

**PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)  
DALAM MEMANFAATKAN MEDIA MASSA GUNA  
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
(STUDI PADA BAGIAN HUMAS KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**SETYO HARTANTO  
NIM. 0410310115**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2009**

**PEMERINTAH KOTA MALANG****SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Tugu No. 1 telp. (0341) 350782

MALANG ( 65119 )

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 489/191 /35.73.134/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. SUBKHAN  
NIP : 196804081988091001  
Pangkat / Gol : PEMBINA ( IV/a )  
Jabatan : KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Menerangkan bahwa :

1. N a m a : SETYO HARTANTO  
NIM : 0410310115  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan  
Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang

telah menyelesaikan penelitian di Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Malang selama 1 bulan (Januari 2009).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. WALIKOTA MALANG

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Humas

**Drs. SUBKHAN**

PEMBINA

NIP. 196804081988091001

### Tanda Persetujuan Skripsi

Judul : Peran Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa  
Guna Mewujudkan Good Governance  
(Studi Pada Bagian Humas Kota Malang)

Disusun Oleh : Setyo Hartanto  
NIM : 0410310115  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi : Pemerintah Daerah

Malang, Juni 2009

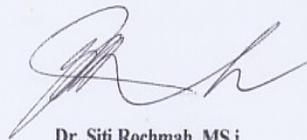
### Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Suryadi, MS  
NIP. 131 697 689

Anggota



Dr. Siti Rochmah, MS.i  
NIP. 131 573 959

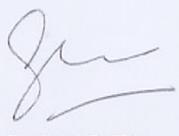
**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI FAKULTAS  
ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA :

HARI : KAMIS  
TANGGAL : 25 Juni 2009  
JAM : 08.00-09.00  
SKRIPSI ATAS NAMA : SETYO HARTANTO  
JUDUL : PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
(HUMAS) DALAM MEMANFAATKAN MEDIA  
MASSA GUNA MEWUJUDKAN *GOOD*  
*GOVERNANCE*

**DAN DINYATAKAN LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**



**Dr. Suryadi, MS**  
KETUA



**Dr. Siti Rochmah, M.Si**  
ANGGOTA



**Drs. Moch. Shobaruddin, MA**  
ANGGOTA



**Drs. Moch. Rozikin, MAP**  
ANGGOTA

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2009



Nama : Setyo Hartanto  
Nim : 0410310115

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan *Good Governance* ( Studi Pada Bagian Humas Kota Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

- 1) Keluargaku tercinta, Ibu Sutiningsih, Bapak Sukarni, Mbak Yuana, Mas Irawan, Mbak Nurul dan Mas Indra. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian.
- 2) Bapak Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya beserta seluruh staff.
- 3) Bapak Dr. Suryadi MS dan Ibu Dr. Siti Rochmah M. Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
- 4) Semua Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mengajar, mendidik dan membagi ilmunya pada penulis selama ini.
- 5) Bapak Nurwidyanto, Bu Diah, beserta seluruh Karyawan Bagian Humas Kota Malang yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, tetap berbagi informasi dan solusi.
- 6) Teman-teman FIA Publik, angkatan 2004, terima kasih atas doa, saran dan kritikan serta dukungan semangatnya.
- 7) Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdoa semoga semua bantuan yang diberikan tersebut dinilai Allah SWT sebagai ibadah dan mendapat imbalan pahala yang sesuai dari-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada diri penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, Juni 2009

Penulis

## RINGKASAN

SETYO HARTANTO 2009, **Peran Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Bagian Humas Kota Malang)** , Dr. Suryadi, MS; Dr. Siti Rochmah M.Si, 94 hal.+xvi

---

---

Di Indonesia, era reformasi membawa suatu perubahan yang dirasa positif dalam perkembangan arus informasi, dimana keterbukaan informasi mulai dijalankan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perkembangan ini didukung dengan mulai berkembang pula media yang digunakan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait. Media massa merupakan suatu alat yang digunakan pihak tertentu dalam menyebarluaskan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Media massa dapat berupa media cetak dan media elektronik, dimana penggunaannya juga harus seimbang dan berpedoman pada hukum yang berlaku.

Humas kota malang sejalan dengan perkembangan arus informasi tersebut melakukan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.. Dengan lancarnya arus informasi diantara ketiga stakeholder tersebut maka diharapkan dapat tercipta kerjasama yang baik demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Humas dapat dikatakan sebagai mata, telinga dan mulut pemerintah daerah dalam melihat, mendengar dan mewujudkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dari hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dapat digambarkan bahwa Humas kota malang masih perlu meningkatkan pelayanannya di bidang penyebaran arus informasi di kota malang. Sedangkan upaya yang sedang dilakukan Humas dalam meningkatkan kinerjanya yaitu dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan melakukan keterbukaan informasi, dimana semua pihak dapat memperoleh informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Humas juga melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti siaran pers dan kegiatan pengklipingan demi menunjang tugas dan fungsinya. Secara teknis, dalam melakukan fungsinya Humas Kota Malang ditunjang oleh beberapa faktor pendukung yang dirasa penting demi kelancaran arus informasi, yaitu undang-undang pers dan partisipasi masyarakat. Namun juga masih terdapat faktor penghambat yang dihadapi Humas Kota Malang dalam melakukan penyebaran informasi, yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan juga faktor Sumber Daya Manusia yang dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi kedepannya.

## SUMMARY

SETYO HARTANTO, 2009, **The Role of Public Relation (Hubungan Masyarakat) in Mass Media Utilizing to actualize Good Governance (Study at Public Relation Section of Local Government of Malang)**, Dr. Suryadi, MS; Dr. Siti Rochmah M.Si, 95 pages, +xv.

---

In Indonesia, reformation era brought to a positive change about information expansion, which information openness has been started by many aspects, such as government as public sector, private sector and also society. This expansion also supported by media that useful to spread the information to the society and also concerned aspect. Mass media is a spreader tools that utilized by certain people for spreading information to the people who need it. Mass media can be organized as print media and electronical media, which the utilization should be balance and guided by official law.

The public relation section of local government of Malang in line with those information flow do their assignment as its duty and function as the bridging between government, private sector and society. By way of the information flow smoothness between those three stakeholders, so it considered to create good cooperation for bringing into being good governance. Public relation can be said to be the eye, the ear, and the mouth of local government in seeing, hearing, and for actualizing the aspiration that grow in the society.

From this research that used the descriptive method by qualitative approach, it can be described as the public relation of local government of Malang still have to increase their services in spreading information flow in Malang. Meanwhile, the effort that done by public relation of local government of Malang in increasing their performance that is by giving the information that needed by concerned aspect by undertaking information openness, where every part can obtain the information in accordance with direct or indirect way. Public relation has been done the routinity program such as pers conference and news clipping to support their task and function. Technically, in order to do their function, the local government of Malang is supported by some proponent factor that important to accelerate information flow, that is press ordinance and also society participation. However, the public relation of local government of Malang should be face another obstacle factor of information spreading, those are the lack of tools and infrastructure that used in information spreading, and also the lack of human resources capability that so far should be increased.

## DAFTAR ISI

## Halaman

<b>TANDA PENGESAHAN</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat .....	9
1. Pemerintah Daerah .....	9
2. Masyarakat .....	11
3. Partisipasi Masyarakat .....	13
4. Komunikasi .....	14
B. Peran Humas Dalam Mewujudkan <i>Good Governace</i> .....	17
1. Hubungan Masyarakat .....	17
2. Hubungan Humas Dengan Media Massa .....	19
3. Media Massa .....	21
4. Fungsi Media Massa .....	24
5. <i>Good Governance</i> .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Fokus Penelitian .....	31
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	32
D. Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Instrumen Penelitian .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	35

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

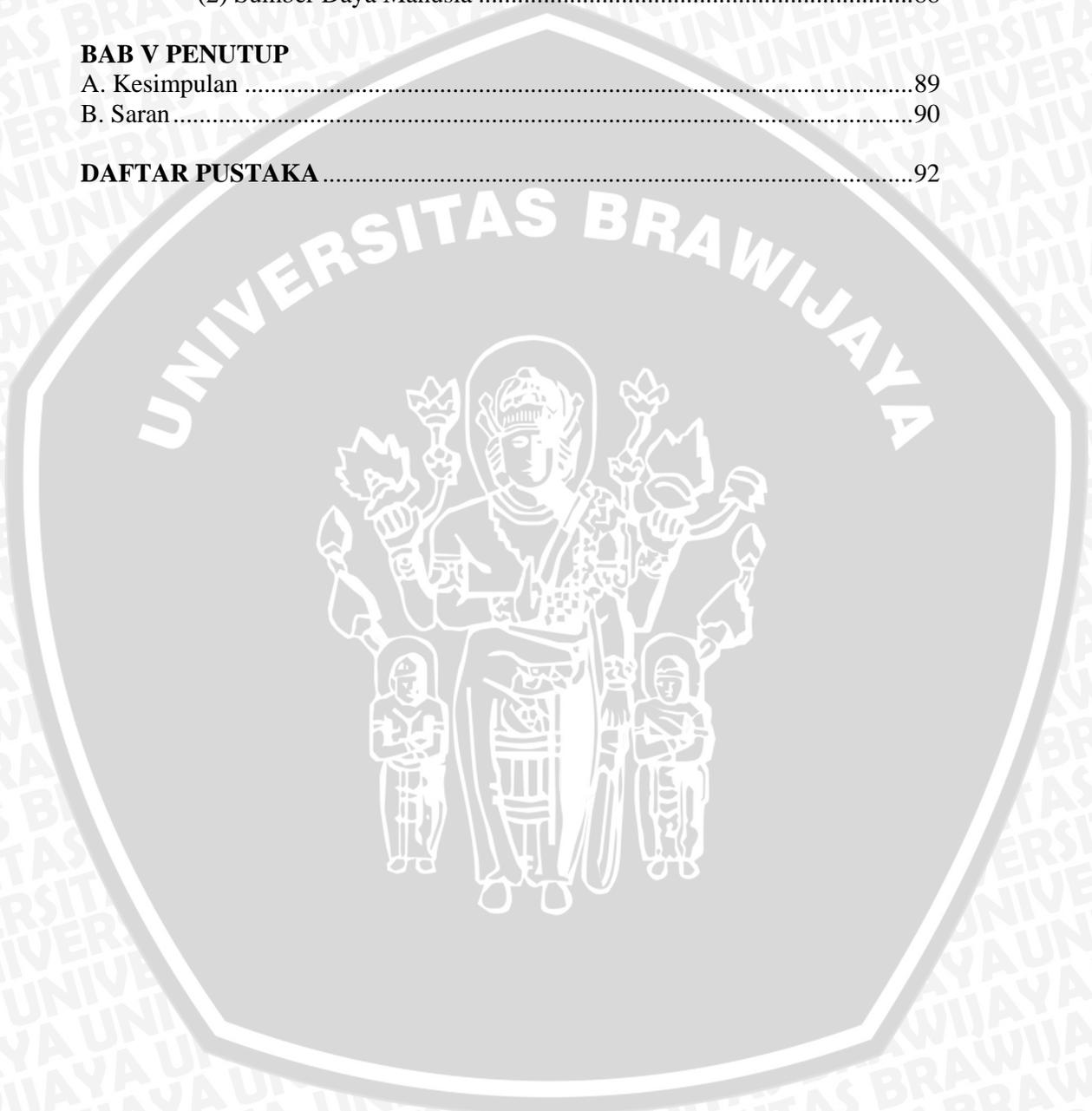
A. Hasil penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Kota Malang .....	37
a. Sejarah Kota Malang .....	37
b. Kondisi Wilayah Dan Geografis .....	39
c. Keadaan Administratif Wilayah Kota Malang .....	40
d. Kondisi Sosial Budaya .....	43
e. Pemerintahan .....	45
(1) Visi Pemerintah Kota Malang .....	45
(2) Misi .....	45
(3) Organisasi Pemerintah Daerah .....	46
2. Gambaran Umum Bagian Humas Kota Malang .....	48
a. Humas Kota Malang .....	48
b. Struktur Organisasi Bagian Humas .....	49
c. Tugas Pokok Dan Fungsi Humas .....	50
d. Visi Dan Misi Humas .....	51
e. Sasaran Dan Tujuan Humas .....	52
f. Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Humas .....	52
(1) Sub Bagian Pemberitaan .....	53
(2) Sub Bagian Dokumentasi .....	53
(3) Sub Bagian Protokol .....	54
g. Kegiatan Humas Kota Malang .....	54
3. Peran Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan <i>Good Governance</i> .....	57
a. Fungsi Media Massa Bagi Humas .....	58
b. Upaya Humas Terhadap Pengembangan Media Massa .....	61
(1) Keterbukaan Informasi .....	61
(2) Siaran Pers .....	62
(3). Kegiatan Pengklipingan .....	64
4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Humas Kota Malang .....	66
a. Faktor Pendukung .....	66
(1) Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 .....	66
(2) Partisipasi Masyarakat .....	68
b. Faktor Penghambat .....	70
(1) Sarana Dan Prasarana .....	70
(2) Sumber Daya Manusia .....	72
B. Pembahasan.....	76
1. Peran Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan <i>Good Governance</i> .....	76
a. Fungsi Media Massa Bagi Humas .....	78
b. Upaya Humas Terhadap Pengembangan Media Massa .....	80
(1) Keterbukaan Informasi .....	81
(2) Siaran Pers .....	82
(3) Kegiatan Pengklipingan .....	83
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Humas Kota Malang .....	84

- a. Faktor Pendukung .....84
  - (1) Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 .....84
  - (2) Partisipasi Masyarakat.....85
- b. Faktor Penghambat .....87
  - (1) Sarana Dan Prasarana.....87
  - (2) Sumber Daya Manusia .....88

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....89
- B. Saran.....90

- DAFTAR PUSTAKA.....92**



**DAFTAR BAGAN**

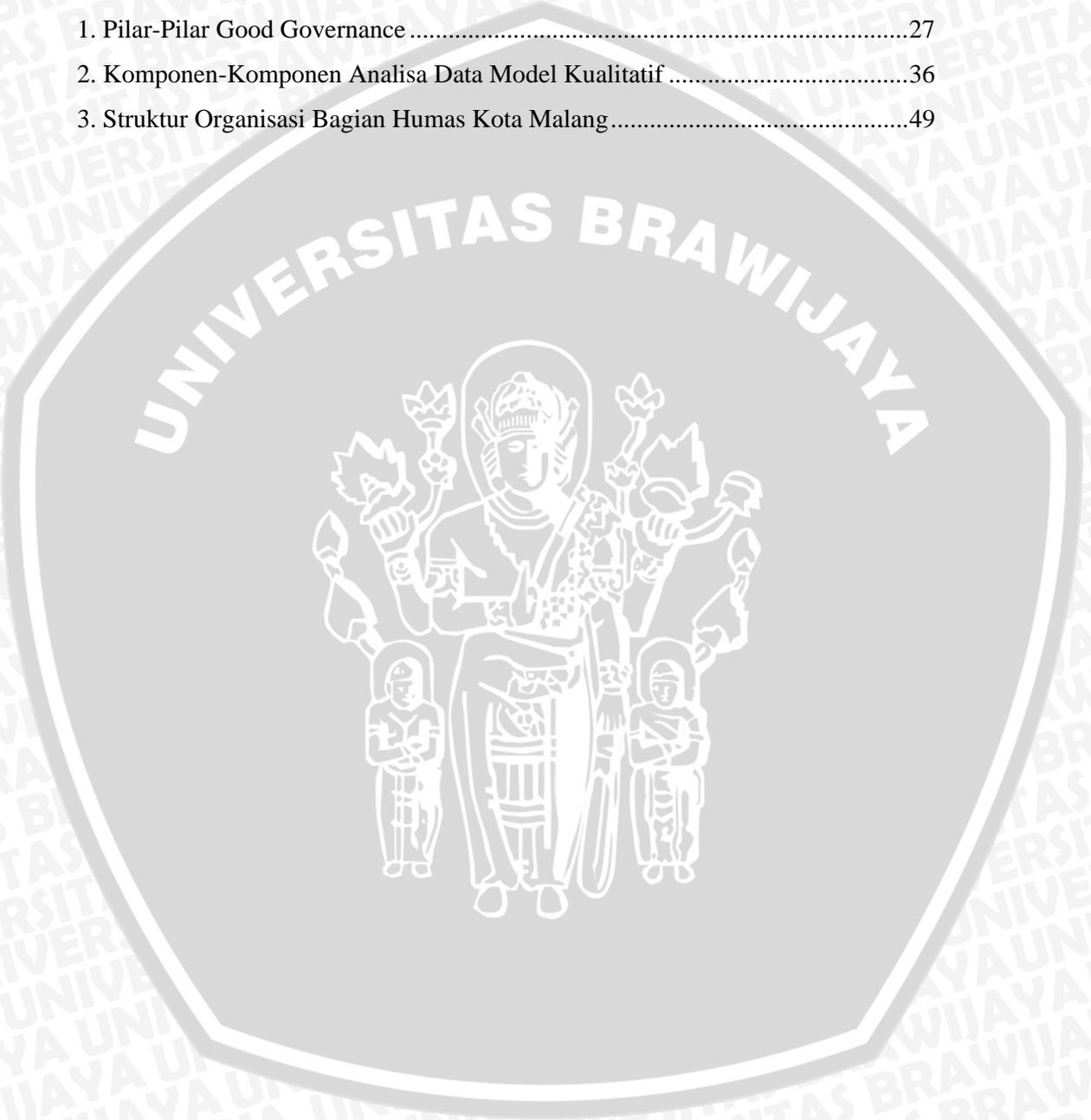
**Bagan**

**Halaman**

1. Pilar-Pilar Good Governance .....27

2. Komponen-Komponen Analisa Data Model Kualitatif .....36

3. Struktur Organisasi Bagian Humas Kota Malang .....49

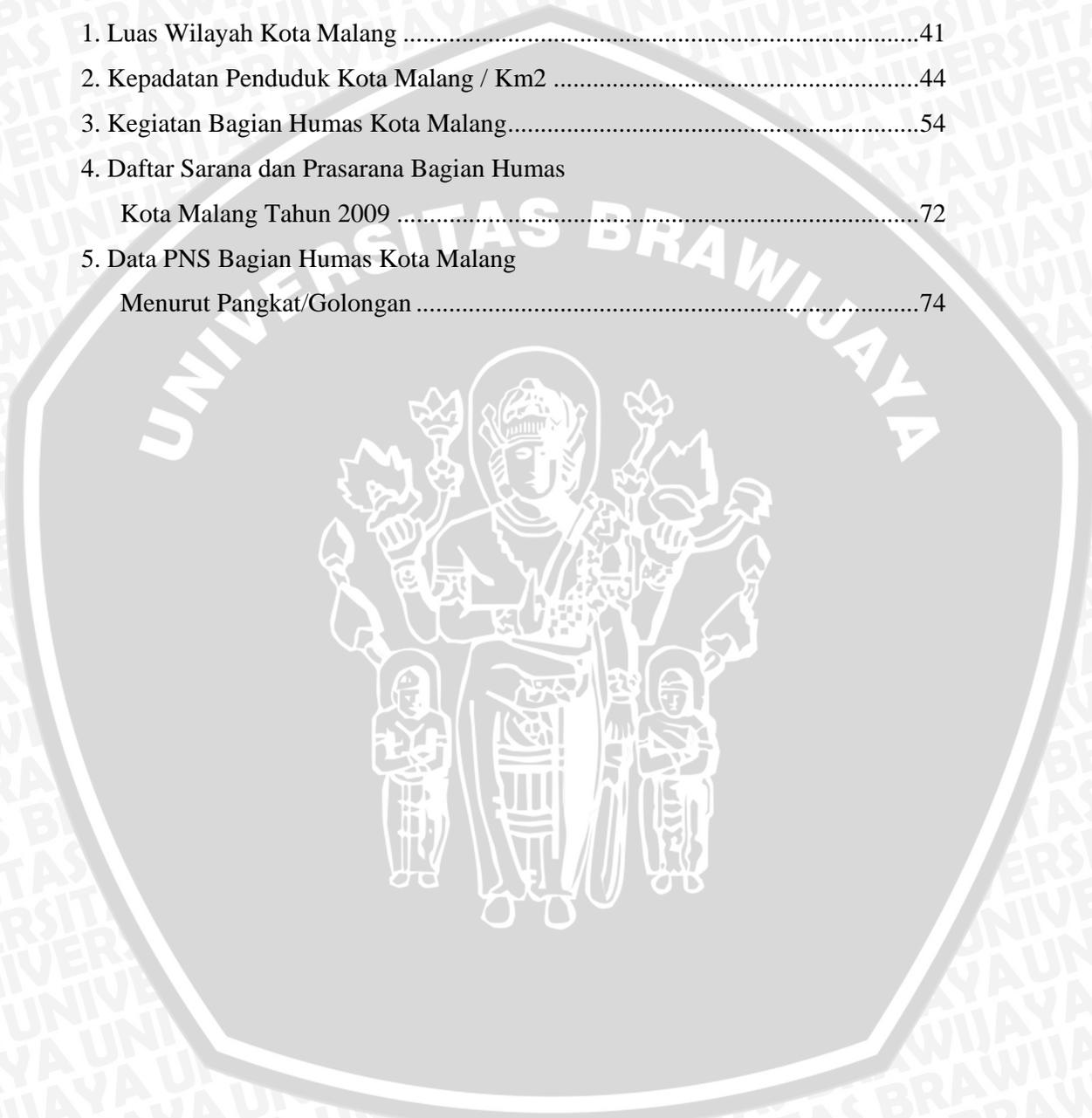


**DAFTAR TABEL**

**Tabel**

**Halaman**

1. Luas Wilayah Kota Malang .....	41
2. Kepadatan Penduduk Kota Malang / Km2 .....	44
3. Kegiatan Bagian Humas Kota Malang .....	54
4. Daftar Sarana dan Prasarana Bagian Humas Kota Malang Tahun 2009 .....	72
5. Data PNS Bagian Humas Kota Malang Menurut Pangkat/Golongan .....	74

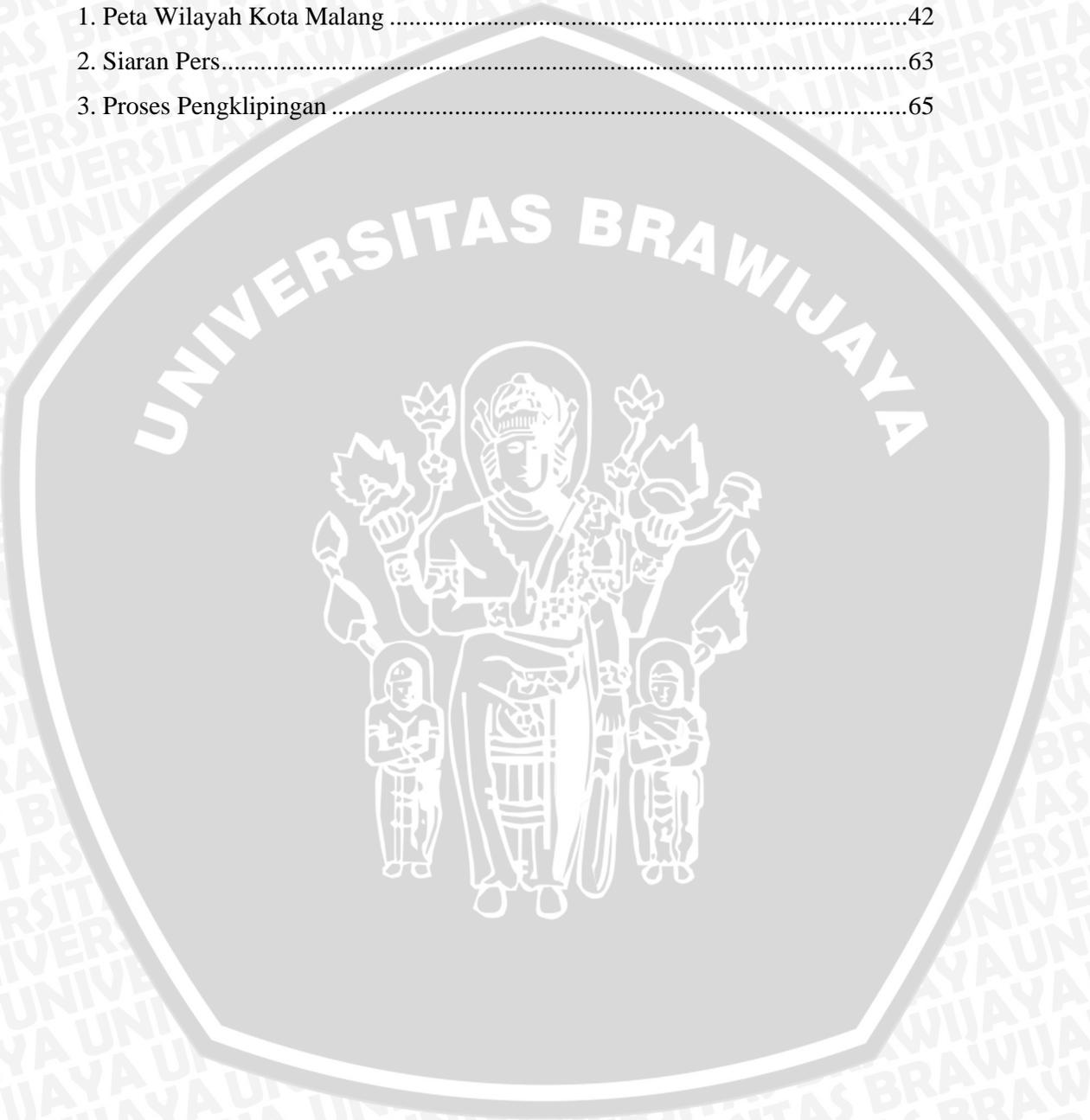


## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

### Halaman

1. Peta Wilayah Kota Malang .....	42
2. Siaran Pers.....	63
3. Proses Pengklipingan .....	65



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran**

**Halaman**

1. Siaran Pers.....	95
2. Kliping .....	96
3. Dokumentasi Penelitian .....	97



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri telah dilaksanakan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, maka Undang-Undang tersebut diamandemen menjadi Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam kebijakan tersebut telah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengatur Daerah sendiri (Kabupaten/Kota). Penyelenggaraan pemerintahan tersebut dimaksudkan demi tercapainya pemerintahan yang baik, yang dikemas dalam suatu prinsip *Good Governance*. Salah satu dari sekian banyak agenda reformasi pemerintahan Indonesia yang hendak di wujudkan adalah bagaimana mewujudkan suatu konsep *Good Governance*, dimana konsep tersebut dinilai berhasil diterapkan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan.

*Good Governance* merupakan upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan *Good Governance*, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek yang ingin dicetak sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Tetapi masyarakat menjadi subyek yang turut mewarnai program-program dan kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek hanya terdapat pada sistem pemerintahan demokratis. Dengan demikian prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Governance* hanya akan tumbuh pada pemerintahan yang mempraktekkan sistem demokrasi. (Basuki dan Shofwan, 2006 :13)

Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah daerah menjadi mandiri dan mampu melaksanakan seluruh kegiatan pemerintah, namun dengan tidak mengabaikan koordinasi dengan pusat dan tidak menyimpang dari dasar-dasar negara yang telah ditetapkan. Pemberian otonomi kepada daerah merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pembangunan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaku utama pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga terjalin kemitraan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian melalui otonomi luas, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah dikarenakan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dengan daerah lainnya, dan dalam memanfaatkan potensi tersebut dibutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kebutuhan dari masing-masing daerah yang mengetahui adalah daerah itu sendiri, untuk itu dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan potensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokratisasi dan desentralisasi yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek dari pembangunan. Maka dalam hal ini masyarakat berwenang untuk ikut serta dalam mengatur dan menyelesaikan masalah sesuai dengan sumber daya atau potensi yang dimiliki untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun bukan berarti segala urusan diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya, tetapi perlu adanya dukungan dan kerja sama yang baik dengan pemerintah. Berdasarkan alasan tersebut diperlukan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah ke masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri dan partisipatif. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik apabila terdapat suatu komunikasi yang efektif diantara mereka.

Untuk menjalin komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus menciptakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka dibutuhkan adanya kelembagaan dan perangkat komunikasi yang efektif. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis, dimana

hal tersebut diimplementasikan dalam wujud membangun dan merevitalisasi perangkat komunikasi sebagai media akses publik serta membangun perangkat hukum, untuk memberikan kepastian hukum bagi terciptanya partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan.

Salah satu elemen untuk mendukung kapasitas daerah terkait kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat adalah tersedianya sistem informasi yang memadai demi lancarnya hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dan untuk mendorong partisipasi publik. Pemerintah daerah harus mempunyai komitmen terhadap transparansi dan akses masyarakat dalam proses kebijakan daerah yang juga mencakup implementasinya. Dalam kerangka akses informasi publik tersebut mensyaratkan badan publik berkewajiban menyebarluaskan produk kebijakan, baik yang berupa peraturan, rencana dan *outcome* kelembagaannya. Disisi lain, menjadi hak masyarakat luas untuk mengikuti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan. Disamping itu, kewajiban masyarakat luas juga memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi mengenai dirinya atau lembaganya secara obyektif. Oleh karenanya, untuk mewujudkannya pemilihan media aksesibilitas publik yang efektif menjadi kunci keberhasilan akses informasi publik.

Selain itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas media komunikasi, dimana tujuannya adalah menciptakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dibangunnya akses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya, maka diharapkan terjalin hubungan yang baik diantara keduanya. Komunikasi dua arah yang maksimal antara pemerintah dengan masyarakat sangat memerlukan suatu media atau lembaga yang mampu memperoleh, mengelola dan menyampaikan informasi secara akurat, terbuka dan bertanggung jawab. Sifat dari lembaga tersebut dapat ditemukan dalam suatu wadah yang disebut media massa. Media massa sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan serta memotivasi dan menggerakkan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 BabI Pasal 1 :

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam

bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam undang undang tersebut dapat diketahui pentingnya peranan *pers* (media massa) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun penggunaan media massa oleh pemerintah ataupun masyarakat juga harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Media massa dalam hal ini mencakup media elektronik maupun media cetak, dimana secara sederhana media massa meliputi : surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam era otonomi daerah guna mewujudkan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Dalam kerangka mewujudkan *Good Governance*, maka pemerintahan daerah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan dan aparat sebagai fasilitator.

Dengan dibukanya saluran demokratisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah, kehadiran pemerintah dirasa semakin dekat dengan masyarakat. Hadirnya media massa diharapkan masyarakat diberikan keleluasaan dalam beraktualisasi diri dan mengekspresikan pendapatnya secara kritis, menanggapi dan menyikapi keadaan realitas jalannya pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan *Good Governance*.

Pemerintah Kota Malang melalui Bagian Humas saat ini berupaya memanfaatkan media massa dengan semaksimal mungkin guna meningkatkan komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance*. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berjalan lancar jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah, media massa dan masyarakat. Untuk itu perlu diciptakan harmonisasi antara pihak pihak yang terlibat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harmonisasi tersebut dapat diraih jika ada kesamaan arah dalam membangun.

Demi menunjang keharmonisan tersebut diatas, maka sangat dibutuhkan peranan Humas yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam hal ini humas merupakan salah satu penghubung antara pemerintah, media massa dan masyarakat. Humas merupakan juru bicara pemerintah kepada masyarakat melalui media massa, dan juga humas berfungsi

sebagai “mata, telinga dan mulut” pemerintah atas respon atau umpan balik yang diberikan kepada masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Memperjelas kebijakan Kepala Daerah Kota Malang serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai unsur Jajaran *Pers* dari media cetak dan elektronik, masyarakat dan perangkat daerah merupakan salah satu sasaran dari bagian humas kota malang ini untuk diwujudkan. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan dipublikasikan kepada masyarakat dengan bantuan dari media massa baik swasta maupun milik pemerintah Kota Malang. Melalui publikasi yang baik diharapkan masyarakat akan mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Malang, yang dalam hal ini akan menciptakan timbal balik yang baik antara Pemerintah Kota dengan masyarakat.

Melihat lebih jauh tentang Kota Malang, dimana salah satu kota pendidikan di Indonesia ini masih mempunyai berbagai permasalahan yang harus dihadapi untuk kedepannya. Permasalahan tersebut khususnya menyangkut kurang maksimalnya peran humas dalam memanfaatkan media massa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang. Informasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota seringkali tidak sampai kepada masyarakat secara luas. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa memperoleh informasi kebijakan pemerintah kota secara lengkap. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap proses pemerintahan di Kota Malang. Permasalahan tak hanya mengenai penyebaran informasi yang kurang maksimal, Ketua UPT Humas Kota Malang, Zulkarnaen dalam [www.jatimprov.go.id/telecenter/malang](http://www.jatimprov.go.id/telecenter/malang), menyatakan :

“bahwa saat ini aparat hubungan masyarakat (Humas) di berbagai Instansi pendidikan dan pemerintah menghadapi tantangan berat sejak era kebebasan pers. Hal ini dikarenakan secara faktual dapat dilihat jarang sekali muncul pemberitaan pers yang mengangkat upaya-upaya yang tengah dilakukan pemerintah atau keberhasilan yang telah dicapai pemerintah”

hal inilah yang menjadi tantangan berat aparat Humas dalam upaya membangun citra pemerintah di mata masyarakat, tak terkecuali dilingkungan Pemerintah Kota Malang.

Ditambahkan oleh beliau yang mengatakan bahwa “saat ini sebagian besar humas pendidikan dan pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih

banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis, dan belum ditunjang sarana kerja yang memadai.” Dalam menyikapi pemasalahan-permasalahan tersebut maka diperlukan peningkatan fasilitas untuk melancarkan arus informasi dari lingkungan pendidikan atau pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, meningkatkan koordinasi dalam menyebarkan informasi, dan peningkatan profesionalisme pejabat Humas di lingkungan pendidikan dan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti sejauh mana peran bagian Humas Kota Malang dalam mengembangkan media massa sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan good governance , maka penelitian ini mengambil judul : **“Peran Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan Good Governance”** (Studi Di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang).”



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Humas dalam memanfaatkan Media Massa guna mewujudkan *Good Governance*?
2. Apa sajakah yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat peran Humas dalam memanfaatkan Media Massa guna mewujudkan *Good Governance*?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini tujuan yang akan dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis pemahaman peran Humas Kota Malang dalam mewujudkan *Good Governance* melalui pemanfaatan media massa
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis analisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi bagian humas Kota Malang dalam mewujudkan *Good Governance* melalui pemanfaatan media massa

## D. Kontribusi Penelitian

1. Secara akademis
  - a) Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya.
  - b) Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
  - c) Bekal wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.
2. Secara praktis
  - a) Bagi instansi yang bersangkutan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana literatur yang terkait dengan Peran

Humas Kota Malang dalam memanfaatkan media guna mewujudkan *Good Governance*.

- b) Sebagai masukan bagi daerah yang menjadi objek peneliti, dalam mengatasi masalah-masalah yang sama.
- c) Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenal dan menilai peran media massa dalam proses pemerintahan, sehingga masyarakat juga dapat secara aktif berpartisipasi demi kelancaran jalannya pemerintahan daerah.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika pembahasan, sehingga pada akhirnya nampak secara garis besar isi dan pemikiran dari tulisan ini. Dalam penelitian ini mencakup beberapa bab yaitu :

##### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

##### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Merupakan Bab Kajian Pustaka yang mengurai tentang beberapa teori yang mendukung serta mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang timbul serta pemecahan terhadap masalah yang ada.

##### **Bab III Metode Penelitian**

Merupakan Bab Metode Penelitian yang menerangkan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta analisis data.

##### **Bab IV Hasil Penelitian**

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian, analisis data dan intepretasi data

##### **Bab V Penutup**

Dalam Bab ini menyajikan tentang beberapa kesimpulan atau hasil penelitian di lokasi penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hubungan Pemerintah Daerah dengan masyarakat

##### 1. Pemerintah Daerah

Mengulas kata pemerintahan, terlebih dahulu perlu dikemukakan perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah menurut Kansil (1983:21) adalah : “Perangkat atau organ yang menyelenggarakan pemerintahan.” Sedangkan menurut Pamudji (1986:23) yang dimaksud pemerintah adalah :”Kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi memerintah suatu Negara (seperti kabinet suatu pemerintahan).”

Arti kata pemerintahan menurut Pamudji (1986:23) adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah, sedangkan menurut Ismani (1996:8) ”Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai susunan dan tujuan tertentu”. Sumber Saparin (1988:21) mengartikan bahwa :”Pemerintahan (*bestuur/administration*) menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai wewenang badan-badan atau lembaga pemerintahan atau para pengusaha pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melakukan kegiatan pemerintahan (*executive power*)”.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu batasan pengertian bahwa pemerintah adalah merupakan suatu proses atau kegiatan yaitu cara melakukan tugas atau kegiatan yang menjadi urusan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ eksekutif dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pemerintah Negara.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahannya telah menjatuhkan pilihan pada asas desentralistik, seperti terlihat dalam ketentuan pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta penjelasannya. Dikaitkan dengan prinsip negara kesatuan yang dianut, maka negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai negara kesatuan yang desentralisasi.

Dengan diadutnya sistem ini, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada prinsip pemencaran kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan guna pengembangan demokrasi dari bawah (Dwidjowijoto, 2000:152). Sebagai konsekuensi diadutnya asas ini, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut daerah otonom, yakni daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi rumah tangga sendiri atas dasar kebijaksanaan dan inisiatif, pembiayaan dan dilakukan oleh perangkat daerah sendiri.

Pembentukan daerah otonom tidak lepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan serta syarat-syarat lain yang memungkinkan melaksanakan pembangunan, pembinaan, kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab (Soejito, 1981:42).

Hakekat penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintah perlu didekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan/kekuasaannya kepada pemerintah daerah (*sharing of power*) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, *sharing of power* terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di pemerintah daerah *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensi. Hasil dari adanya *sharing of power* ini diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih memuaskan.

Pemerintah Daerah di Indonesia terangkum dalam sebuah negara kesatuan karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang

secara administratif dibagi menjadi daerah–daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kota dan kabupaten. Daerah–daerah tersebut merupakan daerah yang bersifat otonom, yang diatur dalam Undang–undang.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas–luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Adapun antar susunan pemerintahan tersebut meliputi hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Pemerintah daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat di daerah yang padat berimplikasi pada efisiensi dan peningkatan responsi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini karena para pemimpin daerah yang dipilih secara langsung mengetahui konstituen mereka lebih baik daripada otoritas pada level nasional. Hal itu akan memosisikan dirinya dengan baik untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

## **2. Masyarakat**

Masyarakat adalah sejumlah manusia (dalam arti luas) yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sementara itu lokal adalah ruang yang luas atau setempat. Mengenai Konsep masyarakat, Harsojo mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap manusia yang cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan Yuwono (1994: 275) menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang mengikuti cara hidup tertentu. Dengan kata lain Masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

Adapun ciri-ciri dari masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1990: 17) antara lain :

1. Memiliki wilayah dan batas yang jelas
2. Merupakan satu kesatuan penduduk
3. Terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen
4. Mengemban fungsi umum.
5. Memiliki kebudayaan yang sama.

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat dibentuk oleh orang-orang yang hidup dalam kelompok-kelompok sosial dari bermacam-macam satuan sosial budaya namun bersedia membentuk landasan kebudayaan baru yang sama, yang memungkinkan dikembangkannya semua potensi yang ada di dalamnya mewujudkan hidup bersama yang lebih sempurna dalam segala aspek. Dalam kehidupan bermasyarakat ini masyarakat mempunyai beberapa tugas pokok antara lain :

1. Melestarikan eksistensi penghuninya sebagai satu bangsa yang sejahtera.
2. Mengatur pembagian tugas.
3. Mempersatukan warga masyarakat.

Dengan demikian tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa di atas bumi yang kita huni ini terdapat bermacam-macam masyarakat manusia, misalnya saja di negara Indonesia, dengan sepiintas kita dapat memperoleh gambaran umum bahwa masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang seragam. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam klasifikasi masyarakat dan untuk mempermudah kita dalam mengklasifikasikan masyarakat berikut ini adalah klasifikasi jenis masyarakat yaitu:

1. Masyarakat maju dan masyarakat sederhana.
2. Masyarakat agama.
3. Masyarakat ekonomi.
4. Masyarakat totaliter dan demokrasi.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Muluk (2007:19) memperjelas partisipasi masyarakat dengan mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970-an yaitu sebagai penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota

masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata. Dari penjelasan mengenai cakupan makna dari partisipasi masyarakat tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi dalam arti luas juga mencakup *involvement* dan *empowerment*. Partisipasi masyarakat mencakup pembuatan kebijakan, implementasinya sampai kendali warga negara terhadapnya. Partisipasi dapat terjadi bila ada demokrasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan haruslah dilihat :

- a. Sebagai jendela mental (*window mental*) yaitu dengan membuka hati rakyat untuk secara sadar dan tulus terlibat dalam proses pembangunan
- b. Sebagai tindakan keterlibatan yang riil, aktif dan kreatif masyarakat dengan diiringi oleh potensi keahlian, kemampuan, pengetahuan dan kesediaan berkorban untuk turut serta memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, dan bukanlah sebagai proses pengerahan massa atau mobilisasi yang berlandung pada konsep partisipasi tetapi merupakan suatu proses penyadaran diri dan penumbuhan keberdayaan dan keswadayaan mereka untuk dapat mengatasi masalahnya sendiri. (Islamy 2004:2)

Partisipasi masyarakat (rakyat) dalam proses pembuatan keputusan dan pemerintahan secara umum, sebagai salah satu prinsip demokrasi, berkembang menjadi tuntutan yang semakin luas diterima di berbagai belahan dunia. Tuntutan akan partisipasi ini berangkat dari pemahaman bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan sesungguhnya dalam sebuah negara (Prasojo 2004:10).

Secara teoritik partisipasi masyarakat terangkum dalam kerangka pendekatan partisipatif khususnya dalam pembangunan (program dan proyek) yang bersifat *bottom up* atau dari lapisan masyarakat *grass root* (bawah). Pendekatan partisipatif melibatkan warga masyarakat dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat, kemampuan masyarakat untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, yang berarti mampu menciptakan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya (Adisasmita 2006:31).

Partisipasi sebagai strategi kebijakan dimaksudkan sebagai upaya atau tindakan dalam perumusan dan implementasi berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat secara *reliable*, *acceptable*, *implementable*, dan *workable* :

- a. *Reliable* dimaksudkan bahwa program pembangunan yang dirumuskan adalah meyakinkan dan terpercaya
- b. *Acceptable* artinya dapat diterima oleh masyarakat luas
- c. *Implementable* berarti dapat diimplementasikan karena program disusun oleh masyarakat berdasarkan potensi
- d. *Workable* yaitu dapat dikerjakan masyarakat setempat artinya dihadapi hambatan atau kekurangan dalam implementasinya, maka segala hambatan dan kekurangan tersebut akan dapat diatasi oleh partisipasi anggota masyarakat setempat, baik dalam dana dan material maupun dalam tenaga dan pemikiran (Adisasmita 2006:132).

#### 4. Komunikasi

Van Doorn & Lammers seperti yang terlampir dalam [www.al-ikhwan.net](http://www.al-ikhwan.net) menyatakan komunikasi adalah merupakan sebagai sebuah tindakan, ia menganalisis komunikasi dari dua sisi yaitu sisi individu dan sisi sosial. Dari sisi individu ia membagi komunikasi menjadi yang bertipe obyektif (dari luar) yang melahirkan kegiatan dan cara tindak dan subyektif (dari dalam) yang melahirkan proses-proses psikis dan sikap. Sedangkan dari sisi sosial ia membagi komunikasi obyektif yang melahirkan interaksi dan relasi sosial, serta subyektif yang melahirkan komunikasi dan hubungan sosial.

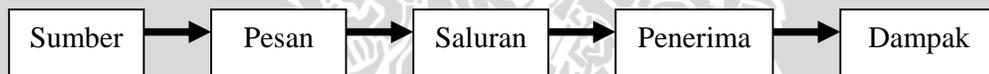
Ditambahkan, Koncaid & Schramn juga menyatakan komunikasi sebagai sebuah proses, artinya komunikasi merupakan proses berbagi/menggunakan sebuah informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi tersebut dinamakan komunikasi. Ciri adanya proses komunikasi menurutnya adalah : Harus ada 2 pihak atau lebih, dan ada proses berbagi informasi, sehingga harus selektif dalam memilih alat komunikasi dan memilih pola yang sesuai untuk menggambarkan pikiran. Lebih jauh ia menyatakan bahwa langkah-langkah dalam sebuah proses komunikasi adalah menciptakan informasi, menyampaikan informasi tersebut, memperdalam perhatian, menafsirkannya, memahaminya lalu melaksanakan, serta timbulnya pengertian

bersama. (<http://www.al-ikhwan.net/peran-media-komunikasi-modern-tv-sebagai-sarana-untuk-menghancurkan-29/>)

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengoperan perangsang atau lambang lambang bahasa komunikator kepada komunikan untuk mengubah tingkah laku individu-individu komunikan. Prosesnya terdiri dari sumber, komunikator dan komunikan. Teori yang disampaikan oleh hovland tersebut hanya bisa berlangsung bila antara komunikator dan komunikan berhubungan dengan langsung atau dekat.

Teori yang mendukung disampaikan oleh Lasswell yang dikutip dari Deddy Mulyana (2004 :136) yaitu cara yang terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan pertanyaan berikut : who says what in which channel to whom with what effect? “ siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana? “

### KOMUNIKASI



sumber : Mulyana, 2004

Sumber dapat juga disebut pengirim merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa meliputi seorangh individu, kelompok, organisasi, perusahaan aau bahkan suatu negara. Pesan merupakan apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan dapat berupa simbol verbal ataupun non verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan atau maksud sumber tadi. Saluran atau media merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Penerima yaitu orang yang menerima pesan dari sumber. Dampak atau efek yaitu apa yang terjadi kepada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, dan lain-lain. (Mulyana, 2004 : 62)

Menurut Agustina Zubair dalam *WordPress.com* weblog, komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Komunikasi adalah suatu proses, Komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan

- b. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan punya tujuan (dilakukan dalam keadaan sadar)
- c. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Aktifitas komunikasi akan berlangsung dengan baik, apabila pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi
- d. Komunikasi bersifat simbolis, Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang.
- e. Komunikasi bersifat transaksional, Komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan; memberi dan menerima.
- f. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu Komunikasi menembus faktor waktu dan ruang maksudnya bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama.

Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu komunikasi suatu pengantar mengutip kerangka berpikir William I. Gordon mengenai fungsi-fungsi komunikasi yang dibagi menjadi empat bagian. Fungsi-fungsi suatu peristiwa komunikasi (communication event) tampaknya tidak sama sekali independen, melainkan juga berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, meskipun terdapat suatu fungsi dominan.

1. Fungsi komunikasi sosial  
komunikasi itu penting membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan. Pembentukan konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Pernyataan eksistensi diri orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau pernyataan eksistensi diri. Ketika berbicara, kita sebenarnya menyatakan bahwa kita ada.
2. Fungsi komunikasi ekspresif  
komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi kita) melalui pesan-pesan non verbal.
3. Fungsi komunikasi ritual  
komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dalam acara tersebut orang mengucapkan kata2 dan menampilkan perilaku yang bersifat simbolik.
4. Fungsi komunikasi instrumental  
komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur (persuasif) suatu peristiwa komunikasi sesungguhnya seringkali mempunyai fungsi-fungsi tumpang tindih, meskipun salah satu fungsinya sangat menonjol dan mendominasi. (Mulyana, 2004 : 21-35)

## B. Peranan Humas Dalam Mewujudkan *Good Governance*

### 1. Hubungan Masyarakat

Pada dasarnya humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi. Humas, yang merupakan terjemahan bebas dari istilah *public relations* atau PR ini seringkali dipakai secara bergantian. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis sengaja menggunakan kedua istilah tersebut yang banyak sekali digunakan secara bergantian oleh para ahli.

Keberadaan *public relation* dalam sebuah lembaga atau instansi dapat menjadi jembatan penghubung antara lembaga tersebut dengan publiknya. Pada dasarnya tujuan *Public Relation* adalah untuk menciptakan, memelihara dan membina hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak yakni lembaga dengan publiknya. Public relation berperan dalam penjelasan atau pembelaan terhadap pandangan yang kurang baik dari publiknya terhadap lembaga tersebut, dengan cara menyajikan berbagai data, fakta dan informasi yang sebenarnya.

Salah satu pengertian Public Relations dikemukakan oleh Abdurachman (1995:25) yang mengatakan bahwa *Public Relations* adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para langganannya, pegawainya, dan publik umumnya. Ada pun kegiatan ini ke dalam adalah dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, sedangkan keluar adalah dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan.

Hubungan masyarakat atau biasa disingkat dengan humas menurut Jefkins (1995:2) dalam bukunya mengatakan bahwa *public relations* adalah bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi baik yang bersifat komersial maupun non komersial, di sector public (pemerintah) maupun privat (swasta) selain itu humas dapat diartikan sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Ditambahkan oleh Jefkins, Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian

Pada Pertemuan asosiasi PR seluruh dunia di Mexico City Agustus 1987, ditetapkan definisi yaitu Humas adalah suatu seni sekaligus suatu disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensi darinya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.

Melihat definisi-definisi di atas maka dapat dijelaskan bahwa sebagai lembaga masyarakat, humas dalam perwujudannya merupakan pergaulan di antara anggota-anggota masyarakat. Humas senantiasa mempengaruhi pihak-pihak lain agar pihak lain itu dapat menginterpretasikan apa yang dikehendaki oleh humas tersebut. Jadi dalam humas terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara lembaga pemerintah maupun swasta dengan masyarakat.

Sementara itu Effendy (2006:24) menjelaskan mengenai ciri-ciri Public relations sebagai berikut :

1. Merupakan kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik (*two way traffic reciprocal communication*). Hal ini berarti bahwa pada jalur pertama komunikasi berbentuk penyebaran informasi dari organisasi kepada publik. Pada jalur kedua komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian tanggapan atau opini publik (*public opinion*) dari publik ke organisasi tadi. Melalui komunikasi dua arah tersebut, pihak organisasi harus selalu mengkaji, apakah informasi yang disebarkan kepada publiknya itu diterima, difahami dan dilaksanakan atau tidak. Evaluasi ini perlu sebagai bahan perencanaan kegiatan kedepannya.
2. Fungsi public relation melekat pada proses manajemen. Eksistensi public relations sebagai pelembagaan kegiatan komunikasi dalam organisasi justru untuk menunjang upaya manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen, untuk mencapai suatu tujuan dalam teori manajemen, disebutkan bahwa prosesnya berlangsung melalui tahap-tahap POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*), serta dilengkapi dengan rumus Six M (*Men, materials, Machines, Methods, Money dan Markets*). Dalam hal ini kegiatan *public relations* adalah khusus yang berkaitan dengan komunikasi. Dalam hal ini adalah manusia yang berada di dalam organisasi dan di luar organisasi.
3. Sasaran kegiatannya adalah publik, baik internal maupun eksternal.
4. Dalam operasionalisasinya, *public relation* membina hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik. Selain itu juga mencegah terjadinya rintangan psikologis pada pihak publik. Sifat harmonis di sini mengandung makna luas, yakni :
  - a) sikap menyenangkan (*favorable*)

- b) itikad baik (*goodwill*)
- c) toleransi (*tolerance*)
- d) saling pengertian (*mutual understanding*)
- e) saling mempercayai (*mutual confidence*)
- f) saling menghargai (*mutual appreciation*)
- g) citra baik (*good image*)

## 2. Hubungan Humas dengan Media Massa

Memasuki era globalisasi yang diwarnai pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya arus informasi dan komunikasi, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta semakin tumbuhnya kelompok dan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah saat ini diharapkan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan timbul baik yang biasa terjadi maupun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka dibutuhkan peranan humas sebagai media penghubung antara pemerintah daerah, masyarakat dan media massa.

Berkenaan dengan hal tersebut maka salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai oleh praktisi humas adalah menjalin hubungan baik dengan kalangan media massa ataupun masyarakat secara umum. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyampaian informasi dari dan untuk masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan lancar demi menunjang kelancaran proses pemerintahan.

Agar proses komunikasi yang dilakukan dapat lebih sempurna, dalam artian informasi yang disampaikan dapat tepat sasaran, maka proses penyampaian informasi harus melalui saluran-saluran tertentu. Dan yang dimaksud dengan saluran dalam hal ini adalah penggunaan media massa yang tepat. Menurut Jefkins (1995:61-62) dalam bukunya public relation terdapat beberapa media yang dapat digunakan oleh humas dalam proses penyampaian informasi, yaitu :

- a. Media *Pers*, terdiri dari berbagai macam Koran yang beredar di masyarakat secara umum, baik berskala regional maupun nasional atau bahkan internasional, Koran-koran gratis ; majalah-majalah yang diterbitkan secara umum naupun hanya dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu; buku-buku petunjuk khusus; buku-buku tahunan dal laporan-l;aporan tahunan dari berbagai lembaga yang sengaja dipublikasikan secara umum.
- b. audio visual, media ini terdiri dari slide dan kaset video, atau bias berupa film-film documenter.

- c. Radio, meliputi semua jenis radio; mulai dari yang berskala local, nasional, ataupun internasional baik dipancarkan luas maupun yang dikemas secara khusus.
- d. Televisi, tidak hanya televisi nasional ataupun regional tetapi juga televisi internasional. Termasuk pula system-sistem teletex seperti prestel, oracle dan ceetax, yaitu perangkat yang memungkinkan pemakainya memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkannya melalui siaran televisi terbatas.
- e. Bahan-bahan cetakan (*printed material*) yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, informative dan menghibur yang disebarakan dalam berbagai bentuk guna mencapai tujuan humas tertentu.
- f. Penerbitan buku khusus (*sponsored book*)
- g. Surat langsung (*spoken word*), melalui komunikasi langsung atau tatap muka yang bias dilangsungkan dalam berbagai kesempatan.
- h. Pemberian sponsor (*sponsorship*) sering dilakukan dalam rangka melancarkan suatu iklan atau mendukung usaha-usaha pemasaran. Dalam setiap sponsor selalu terkandung elemen humas karena terdapat niat baik organisasi yang memberikannya.

Humas sebagai komunikator dapat memilih media mana yang sesuai digunakan dalam menyampaikan informasi. Antara media yang digunakan dengan materi berita (informasi) yang disampaikan harus terdapat kesesuaian. Dalam hal ini penggunaan media komunikasi resmi lebih baik dan menguntungkan karena selain berita yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, juga masyarakatpun dapat dengan mudah untuk menyerap maksud dan tujuan dari informasi yang disampaikan.

### 3. Media Massa

Sebelum dibahas tentang media massa, terlebih dahulu akan dibahas mengenai komunikasi massa. Karena seperti diketahui bahwa media massa tidak lepas dari perlunya pemahaman tentang komunikasi massa. menurut De Fleur & McQuails ( <http://inherent.brawijaya.ac.id>) komunikasi massa sebagai suatu proses melalui mana komunikator menggunakan media utk menyebarluaskan pesan secara luas dan terus menerus menciptakan makna serta diharapkan mempengaruhi khalayak besar dan beragam.

Littlejohn ( <http://inherent.brawijaya.ac.id>) juga menambahkan komunikasi massa adalah suatu proses dimana organisasi media memproduksi dan mentransmisikan pesan kepada publik yang besar dan proses dimana pesan itu dicari, digunakan, dimengerti dan dipengaruhi oleh audience.

Menurut Cangara (2002 : 63-64), komunikasi massa memiliki fungsi-fungsi yaitu :

1. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpulkan, menyimpan data. Fakta dan pesan, opini dan komentar sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi diluar dirinya.
2. Sosialisasi, yaitu menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada.
3. Motivasi, yaitu mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat dengar lewat media massa.
4. Bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak.
5. Pendidikan, yaitu membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun di luar sekolah.
6. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarkan hasil hasil kebudayaan melalui pertukaran program radio dan televisi.
7. Hiburan, media massa telah menyita banyak luang untuk semua golongan manusia dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah tangga.
8. Integrasi, komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menjebatani perbedaan-perbedaan dalam memupuk dan memperkokoh persatuan bangsa.

Dalam bukunya, effendy (1981:40) juga menyatakan bahwa sifat-sifat komunikasi massa adalah:

- a. Umum, terbuka bagi semua orang
- b. Heterogen, komunikasi bermacam-macam terdiri dari bermacam-macam golongan umur, golongan sosial dan sebagainya.
- c. Simultan, keserempakan kontak dengan sejumlah besar orang, penduduk atau masyarakat dalam jarak dan waktu yang sama.
- d. Non pribadi, hubungan antara komunikator dan komunikan tidak bersifat pribadi.

Pada dasarnya komunikasi massa adalah suatu penyampaian pesan yang ditujukan khalayak yang tentunya khalayak tersebut bersifat heterogen, yang akan efektif dalam mencapai tujuan komunikasi apabila didukung dengan melalui perantara alat atau media yang disebut media massa. Effendy (1981 : 15) menyatakan bahwa “ proses komunikasi melalui media massa adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti yang dioperkan dengan menggunakan saluran-saluran yang dikenal dengan pers, televisi, radio”.

Komunikasi massa dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Jurnalistik**  
Menurut Adi Nugroho jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya untuk memberikan penggambaran pada masyarakat dengan sekkas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya.
2. **Public Relation**  
Pertama kali ditemukan atau di lahirkan di Amerika Serikat tahun 1900. *Public Relation* pada umumnya diartikan ( hubungan masyarakat). *Public Relation* artinya suatu bentuk spesialisasi public yang bertujuan saling mengerti dan bekerjasama antar satu public yang berkepentingan guna mencapai keuntungan dan keputusan bersama.
3. **Penerangan**  
Penerangan itu adalah terjemahan yang tepat untuk pablistik.
4. **Propaganda**  
Menurut Lenin tokoh komunis Uny Sofiet berpendapat bahwa propaganda adalah mengemukakan banyak pikiran yang menerangkan suatu masalah yang khusus.
5. **Adventisins**  
Adventisins atau iklan ialah suatu bentuk spesialisasi publisitik yang bertujuan untuk mempertemukan suatu pihak yang menawarkan sesuatu dengan pihak yang lain yang membutuhkannya.
6. **Pablicity**  
Pablicity adalah salah satu bagian atau spesialisasi dari pada keseluruhan ilmu komunikasi atau pablistik.
7. **Publik speaking**  
Publik speaking adalah bentuk publistik berupa pembicaraan yang diucapkan seseorang di depan orang banyak atau massa mengenai suatu masalah sosial.
8. **Agitasi**  
Agitasi adalah suatu cara atau upaya untuk merangsang rakyat dan mendorong membangkitkan perasaan dan gagasan yang dapat membuat mereka gelisah dan tidak puas.  
(<http://massofa.wordpress.com/?s=komunikasi>)

Setelah memahami tentang komunikasi massa, kita merujuk pada pengertian media massa. Istilah “media massa” sering digunakan pada alat teknik melalui apa komunikasi massa terjadi. Dari sudut pandang ini media massa meliputi :

1. Media cetak-surat kabar, majalah, buku, pamflet, bill boards, dan alat teknik lainnya yang membawa pesan kepada massa engan cara menyentuh indera penglihatan.
2. Media elekteronik
  - a. Program radio dan rekaman yang menyentuh indera pendengaran

- b. Program televisi, gambar bergerak dan rekaman video yang menyentuh kedua indera pendengaran dan penglihatan. (Blake dan Haroldsen, 2003 : 42).

Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas dalam hal ini media massa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pemerintahan, karena lancar tidaknya kegiatan pemerintahan ditentukan oleh media massa. Media massa sebagai lembaga resmi yang mempunyai landasan hukum mempunyai keharusan untuk menyebarkan informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat secara luas.

Kehadiran media massa menuntut dua perkembangan yaitu kemajuan teknologi untuk menghasilkan peralatan yang dibutuhkan dan tuntutan tingkat pendidikan diantara sejumlah besar orang yang menggunakan penyebaran informasinya. Kehadiran media massa bergantung dan mempengaruhi tingkat pendidikan dan pengetahuan manusia. Lebih jauh dalam batas waktu yang lama selera manusia pada semua media massa tampaknya meningkat bersamaan dengan meningkatnya pendidikan.

Kertapati (1981:106) menyatakan bahwa media massa harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Publisitas dalam sifatnya, artinya terbuka untuk umum, setiap orang dapat turut serta mengetahuinya
2. Masalitas dalam produknya, artinya hasilnya dapat berlipat ganda.
3. Universalitas atau pluralitas dalam penyampaiannya, artinya apa yang ditujukan harus menyangkut segala segi kehidupan masyarakat atau perhatian manusia.
4. Aktualitas dalam isi pesannya, artinya sesuai dengan perhatian dan kepentingan masyarakat manusia.
5. Perioditas dalam penyiarannya, artinya teratur waktu-waktu siarannya.
6. Simultan penerimaannya oleh khalayak

#### **4. Fungsi Media Massa**

Media massa sudah menjadi suatu kebutuhan sehari-hari masyarakat yang dinamis. Peran media massa melebihi peran seorang guru jika dilihat dari faktor penyebarannya dan audiensnya. Media massa yang didalamnya terkandung tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya dan teknologi merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi

masyarakat. Menurut Mcquail (1994:70-71) bagi masyarakat, media massa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Informasi
  - a. Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dunia
  - b. Menunjukkan hubungan kekuasaan
  - c. Memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan
2. Korelasi
  - a. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi
  - b. Menunjang otoritas norma-norma yang mapan
  - c. Melakukan sosialisasi
  - d. Mengkoordinir beberapa kegiatan
  - e. Membentuk kesepakatan
  - f. Menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif
3. Kesenambungan
  - a. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan budaya khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru
  - b. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai
4. Hiburan
  - a. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi
  - b. Meredakan ketegangan sosial
5. Mobilisasi  
Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang agama

Dengan fungsi yang melekat pada media massa, maka media massa mampu untuk membentuk pola maupun tata kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut Mcquail (1994:73) menjelaskan kerangka peran media massa bagi individu, yaitu :

1. Informasi
  - a. Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia.
  - b. Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan.
  - c. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.
  - d. Belajar, pendidikan diri sendiri.
  - e. Memperoleh rasa damai melalui pemahaman tentang diri sendiri.
2. Identitas pribadi
  - a. Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi.
  - b. Menemukan model perilaku.
  - c. Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain (dalam media)

- d. Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri.
3. Integrasi dan interaksi sosial
  - a. Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain; empati sosial.
  - b. Mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki.
  - c. Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial.
  - d. Memperoleh teman selain dari manusia.
  - e. Membantu menjalankan peran sosial.
  - f. Memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungi sanak keluarga teman, dan masyarakat.
4. Hiburan.
  - a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan.
  - b. Bersantai.
  - c. Memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis.
  - d. Mengisi waktu.
  - e. Penyaluran emosi.
  - f. Membangkitkan gairah seks.

### 5. Good Governance

*Good governance* dalam pengertian paling sederhana adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. menurut world bank *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran adalah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalani disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya dunia usaha.

Prinsip-prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh Andrianto (2007:24) yaitu meliputi :

1. Partisipasi Masyarakat  
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.
2. Tegaknya suplemasi hukum  
Penegakan hukum harus adil dan dibelakukan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi  
Tolak ukur transparansi adalah atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan dapat diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

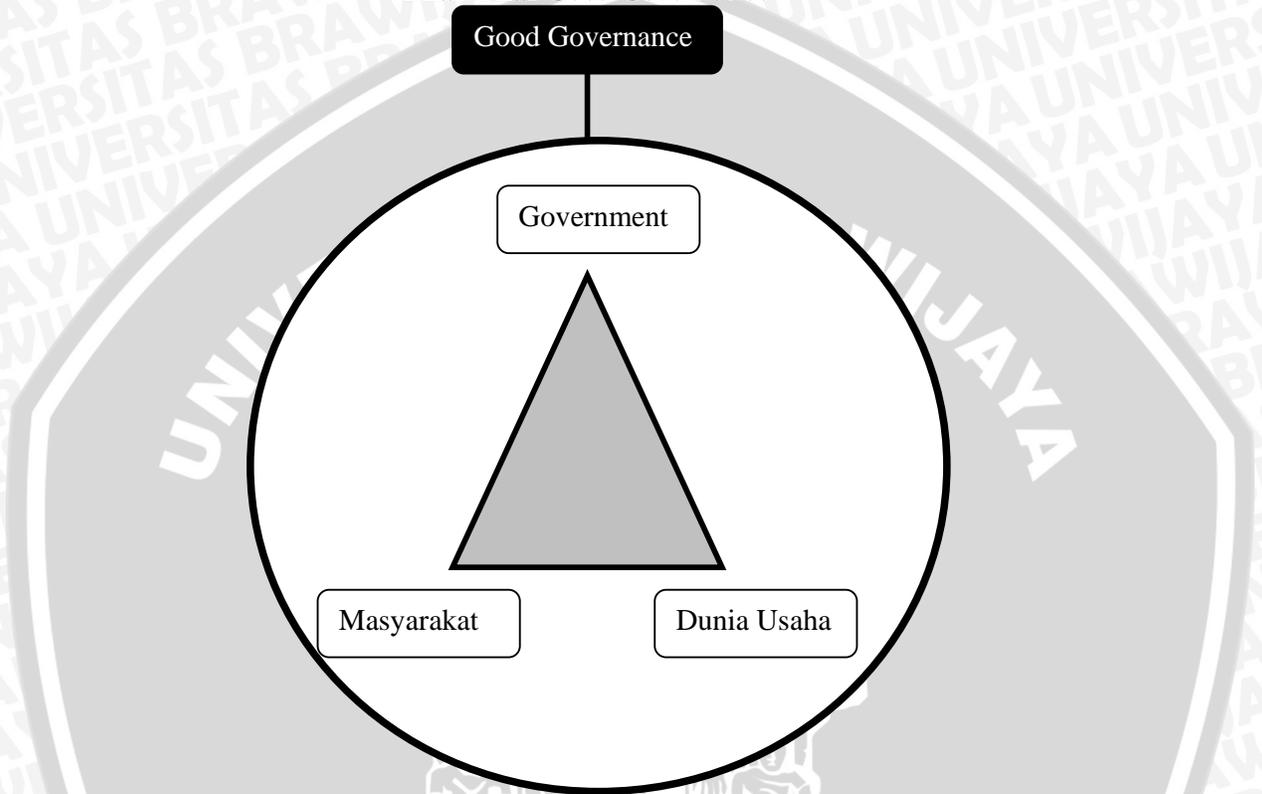
4. Peduli pada stakeholder  
Seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada konsensus  
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsensus yang menyeluruh demi kepentingan dan kebaikan bersama.
6. Kesetaraan  
Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya.
7. Efektifitas dan efisiensi  
Proses pemerintahan yang membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas  
Para pengambil keputusan di pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
9. Visi strategis  
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan dalam mewujudkan perkembangan tersebut.

Andrianto (2007:26) menjelaskan bahwa *Good Governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. pilar-pilar *Good Governance* meliputi:

1. Negara
  - a. menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
  - b. membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
  - c. menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*.
  - d. menegakkan HAM
  - e. melindungi lingkungan hidup
  - f. mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
2. Sektor swasta
  - a. menjalankan industri
  - b. menciptakan lapangan kerja
  - c. menyediakan insentif bagi karyawan
  - d. meningkatkan standar hidup masyarakat
  - e. memelihara lingkungan hidup
  - f. menaati peraturan
  - g. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
  - h. menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
3. Masyarakat
  - a. menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
  - b. mempengaruhi kebijakan publik
  - c. sebagai sarana *checks and balances* pemerintah
  - d. mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah

- e. mengembangkan SDM
- f. sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

**Bagan 1**  
**Pilar-Pilar *Good Governance***



sumber : Andrianto (2007:26)

Basuki dan Shofwan, (2006:9) mengemukakan bahwa *Good Governance* berorientasi pada: pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. orientasi pertama menunjuk pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy, accountability scuring of human rights, autonomy and devolution of power and assurance*. orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

*Good Governance* merupakan upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan *Good Governance*, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek yang ingin dicetak sebagaimana yang diinginkan pemerintah. tetapi masyarakat menjadi subyek yang turut mewarnai program-program dan kebijakan pemerintah. sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek hanya terdapat pada sistem pemerintahan demokratis. dengan demikian prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Governance* hanya akan tumbuh pada pemerintahan yang mempraktekkan sistem demokrasi. (Basuki dan Shofwan, 2006:13)



### BAB III METODE PENELITIAN

Pembuatan rancangan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan tersebut secara ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk mempermudah penulisan dan penyelesaiannya.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan kegiatan untuk mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, guna mencapai tujuan ini maka dibutuhkan suatu metode yang paling tepat dan mempunyai keserasian dengan tujuan penelitian. Seperti halnya menurut Nazir (2003: 95) “ penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.”

Pada dasarnya terdapat tiga macam metode penelitian yang utama yaitu metode historis, metode diskripsi dan metode penelitian eksperimental. Metode historis lebih menekankan pada gejala yang telah lampau, sedangkan metode diskriptif ditujukan pada masalah yang terjadi pada masa sekarang, dan metode eksperimental menekankan pada percobaan guna menemukan satu hasil atau lebih sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hal tersebut maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada dasarnya penelitian yang bersifat diskriptif ini berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu secara terperinci, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas. Dengan tujuan memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.

Menurut Nazir (2003: 63 ) “ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti statis kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran,

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diteliti”.

Sementara pakar yang lain, seperti Sutrisno Hadi mengartikan penelitian deskripsi sebagai suatu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan objek atau peristiwa tertentu tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan H.H. Nawawi mengartikan penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian, baik berupa organisasi, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri penelitian deskriptif adalah:

- a. Penelitian deskriptif diupayakan untuk menggambarkan fenomena tertentu secara terperinci.
- b. Hasil akhir dari penelitian adalah suatu kesimpulan yang tidak berlaku umum, tetapi hanya berlaku pada lokasi penelitian saja.
- c. Menggambarkan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagai adanya.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2000: 4).

Dengan demikian dipandang dari sudut pendekatan dan proses penelitiannya, penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus sebagai berikut (Marshall dan Rosman, 1989) :

1. Bersifat induktif, yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. Dalam hal ini konsep-konsep, pengertian-pengertian dan pemahaman didasarkan pada pola-pola yang ditemui didalam data.
2. Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada. Oleh karena itu, manusia dan setting tidak disederhanakan ke dalam variabel, tetapi dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan.
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti ). Hal ini dilakukan dengan cara melakukan empati

pada orang-orang yang diteliti dalam upaya memahami bagaimana mereka melihat berbagai hal dalam kehidupannya.

4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. Oleh karena itu, bukan pemahaman mutlak yang dicari, tetapi pemahaman tentang kehidupan sosial.
5. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris. Penelitian dirancang sedemikian rupa agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan apa yang dilakukan dan dikatakan yang diteliti. Dalam hal ini data bukannya tidak akurat, tetapi prosedurnya yang tidak distandarisasi.
6. Bersifat humanistik, yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupannya sehari-hari.
7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian akan membimbing dan mengarahkan seorang peneliti, sehingga peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dikumpulkan karena tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang (Moleong,2006:63).

Fokus penelitian ini adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data-data yang perlu dikumpulkan guna menjamin pelaksanaan peneliti sesuai dengan apa yang direncanakan.

Penetapan batasan berdasarkan fokus yang timbul dalam masalah penelitian sangatlah penting. Ini akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan penelitian, sebab dengan penetapan fokus penelitian secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan akan lebih terarah, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan. Selain itu penetapan batasan fokus penelitian juga dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam mencapai tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

3. Peran Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan Good Governance
  - a. Fungsi Media Massa Bagi Humas
  - b. Upaya Humas Terhadap Pemanfaatan Media Massa
    - i. Keterbukaan Informasi
    - ii. Siaran Pers
    - iii. Kegiatan Pengklipingan
4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peranan Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan Good Governance
  - a. Faktor Pendukung.
    - i. Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999
    - ii. Partisipasi Masyarakat
  - b. Faktor Penghambat.
    - i. Sarana Dan Prasarana
    - ii. Sumber Daya Manusia

### **C. Pemilihan Lokasi dan Situs**

Yang dimaksud dengan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang ditelitinya untuk mendapatkan data yang valid, akurat, serta yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Jadi situs penelitian berbeda dengan lokasi penelitian, yang diartikan sebagai tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti.

Penelitian ini mengambil lokasi di kota malang, sedangkan situs penelitian adalah di kantor bagian humas pemerintah kota malang serta tempat lainnya yang mendukung selama penelitian.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari nara sumber. Pada umumnya data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait

sehingga memperoleh data dan informasi yang lengkap, yang mungkin tidak didapatkan dari data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh dari Kepala Bagian Humas Kota Malang beserta staffnya dan Masyarakat Kota Malang.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari nara sumber. Untuk kepentingan penelitian ini data sekunder yang akan dikumpulkan adalah data yang sudah tersedia dalam tempat penelitian dilakukan yaitu berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat juga dari para pakar, surat kabar, majalah, peristiwa, buku, dokumen dan data dari internet.

### E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data diperlukan teknik-teknik tertentu agar data yang diperoleh nantinya tidak terjadi penyimpangan dengan apa yang dimaksudkan, yaitu data yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti. sehingga dalam penelitian digunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang saling melengkapi, di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*) dengan mendatangi lokasi.
2. Ketika berada di lokasi (*getting along*) dengan berfokus pada pengenalan dan melakukan pendekatan-pendekatan baik formal dan informal antara peneliti dengan pihak yang terkait.
3. Pengumpulan data-data (*logging in data*) yang dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga teknik observasi dalam penelitian ini ialah pengamatan terhadap Peran Humas dalam meningkatkan peran media massa

sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*.

- Wawancara, merupakan suatu cara pengumpulan data primer melalui tanya jawab secara langsung dengan pimpinan maupun staff yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah sumber data penelitian, yaitu sebagaimana halnya yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya.
- Dokumentasi, yaitu mendapatkan data dengan melalui arsip-arsip yang mendukung penelitian yang dilakukan, baik dari penelitian terdahulu maupun data-data yang berlaku sekarang. Data dalam penelitian ini yaitu segala hal yang terkait dengan peran Humas Kota Malang dalam memanfaatkan media massa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Beberapa cara pengumpulan data melalui penelitian lapangan di dalam khasanah penelitian sosial, dikenal beberapa jenis metode yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan atau merekam data. Pada penelitian sosial metode yang lazim digunakan adalah angket, wawancara, observasi, dokumenter dan sebagainya (Faisal, 1982: 41).

#### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan antara lain adalah:

1. Peneliti sendiri. Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif. Karena seorang peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2000: 121).
2. Catatan lapangan (*field note*). Menurut Bogdan (1990: 74), catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

3. Interview Guide. Dalam ini peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. (Moleong, 2000: 136)
4. Dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. data ini dapat diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini.

### **G. Teknis Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa terhadap data tersebut. Adapun pengertian dari analisa data sesuai dengan pendapat dari Bogdan yang menyebutkan sebagai “ upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. (Bogdan, 1990: 248)

Sementara itu adapun tahap-tahap dalam menganalisa data tersebut yaitu:

#### **1. Reduksi data.**

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam laporan atau uraian yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari temanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

#### **2. Penyajian data.**

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dimaksudkan agar memudahkan untuk melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian yang tertentu dari penelitian.

#### **3. Penarikan kesimpulan.**

Penarikan kesimpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis makna dari setiap data yang didapat yaitu mencari pola, tema,

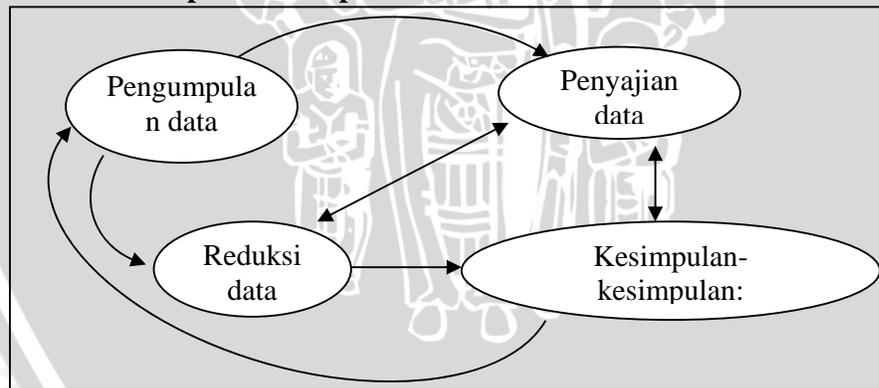
hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul, dan hal-hal lainnya yang tertuang dalam kesimpulan. Dengan bertambahnya data melalui proses penarikan kesimpulan tersebut, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat mendasar. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan penarikan kesimpulan selama penelitian berlangsung.

Ketiga tehnik analisa data tersebut, baik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan pada dasarnya sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis ( Miles dan Huberman, 1992: 19).

Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit sekali menggunakan data yang berupa angka. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan ditampilkannya tabel untuk mendukung kelengkapan data dan kevalidan data.

**Bagan 2**

**Komponen-Komponen Analisa Data Model Kualitatif**



Sumber: Miles dan Huberman diterjemahkan Rohadi, 1992 : 20

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kota Malang

##### a. Sejarah Kota Malang

Kota Malang terbentuk pada tanggal 1 April 1914 sebagai kotapraja dan hingga tahun 1919 dipimpin oleh seorang walikota (*burgemester*) kemudian pada tanggal 7 Maret 1942 yaitu pada masa penjajahan Jepang, Kota Malang diduduki oleh bala tentara Jepang, tetapi pengambilalihan pemerintah pada prinsipnya meneruskan sistem lama yang pernah berlaku sebelumnya (jaman Belanda) hanya sebutan-sebutan dalam jabatan-jabatan saja diganti dengan bahasa Jepang. Selama masa penjajahan Jepang Kota Malang berhasil membuat 33 peraturan setelah proklamasi kemerdekaan tepatnya pada tanggal 21 September 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah dibentuk serta mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Malang menjadi Republik Indonesia, kemudian pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda berusaha kembali untuk menjajah dan meletuskan perang yang menyebabkan pemerintah daerah dan perangkatnya mengungsi keluar kota, kemudian sampai pada tahun 1950 berlangsung pemerintah federasi, baru pada tanggal 2 Maret 1950 aparatur pemerintah Republik Indonesiakembali daripengungsian dan menduduki balai Kota Malang. Sejak masa itu Pemerintah daerah Kota Malang berlangsung kembali dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia dan diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terus berkembang hingga berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai sekarang dan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diganti nama menjadi Kota Malang.

Dalam perspektif Propinsi Jawa Timur, Kota Malang adalah salah satu dari sembilan pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang memiliki wilayah pengembangan yang sangat potensial, baik karena pengaruh dari SWP Gerbangkertasusila atau karena potensi internal wilayahnya sendiri, maka SWP Malang Pasuruan dikembangkan secara optimal untuk pembangunan secara makro dan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pemerintah Kota Malang telah memiliki serangkaian tujuan politis dalam artian luas, yang utamanya melalui implementasi dari Program Pembangunan Perkotaan bagi Kota Malang. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kota Malang. Adapun Visi Kota Malang 2004-2008, yaitu “Terwujudnya Kota Malang Yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut, penjabaran Misi Kota Malang untuk tahun 2004 - 2008 adalah :

- (1) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan
- (2) Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota
- (3) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi system kehidupan ekonomi, social, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang
- (4) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial
- (5) Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat
- (6) Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- (7) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

## **b. Kondisi Wilayah dan Geografis**

Topografi wilayah Kota Malang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan laut, dimana daerah terendah terletak di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang dan Daerah tertinggi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru.

Kota Malang sangat dikenal dengan sebutan Kota Bunga karena dengan tanah yang subur dan iklim yang sangat ideal untuk berbagai jenis tanaman maupun bunga sehingga dapat tumbuh dengan dan berkembang dengan baik. Sehingga hawa pegunungan yang sejuk sangat terasa. Kondisi demikian merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi sebagian masyarakat kota-kota besar untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota peristirahatan bahkan sebagai tempat tinggal dan menetap. Sehingga hal ini dapat mempercepat pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Kota Malang saat ini sebesar 0,84% dengan kepadatan penduduk rata-rata 6,87 per km<sup>2</sup>.

Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl. Kota Malang juga dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Arjuno disebelah utara, Gunung Tengger disebelah timur, Gunung Kawi disebelah timur dan Gunung Kelud disebelah selatan. Kota yang berada di dataran tinggi ini memiliki temperatur rata-rata 24,44 derajat celsius dan kelembapan udara 72% serta memiliki curah hujan rata-rata 2,279 milimeter pertahun.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, dengan luas wilayah administrasi sebesar 110,06 km<sup>2</sup>. Kota Malang terletak pada koordinat 112,06<sup>0</sup> - 112,07<sup>0</sup> bujur timur dan 7,06<sup>0</sup> - 8,02<sup>0</sup> lintang selatan dengan ketinggian antara 440-667 dpl, serta dikelilingi gunung-gunung yaitu :

- a. Gunung Arjuno di sebelah utara
- b. Gunung Tengger di sebelah timur
- c. Gunung Kawi di sebelah barat
- d. Gunung Kelud di sebelah selatan

Letak geografis yang dikelilingi gunung dan berada di kawasan dataran tinggi menyebabkan Kota Malang berhawa sejuk dan kering dengan suhu rata-rata

24,13<sup>0</sup> celcius, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72%.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

- a. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- b. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- c. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- d. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas dan menjadi daerah pendidikan.

### **c. Keadaan Administratif Wilayah Kota Malang**

Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang, memiliki letak geografis yang cukup strategis dan pintu masuk kota yang di batasi beberapa wilayah yang sekaligus merupakan batasan wilayah administratif sebagai berikut :

- (1) Wilayah Utara Kota Malang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang
- (2) Wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- (3) Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- (4) Wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Karang Ploso, Desa Sutirejo, Sidorahayu, Pandung Landung, Kalisongo, Karang Widoro, Tlogowaru dan Landungsari Kabupaten Malang.

Sedangkan secara administratif pemerintahan Kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedung Kandang. Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 1987 Kota Malang mendapat penambahan 12 (dua belas) desa dari Kabupaten Malang. Desa-desanya antara lain Desa Cemorokandang, Desa Arjowinangun, Desa Tlogowaru, Desa Tasikmadu, Desa Tunggul Wulung, Desa Tlogomas, Desa Merjosari, Desa Bandulan, Desa

Mulyorejo, Desa Bakalan Krajan dan saat ini telah menjadi bagian dari pemekaran kecamatan yang ada di Kota Malang. Pembagian luas wilayah Kota Malang dari masing-masing kecamatan beserta jumlah kelurahannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Kota Malang**

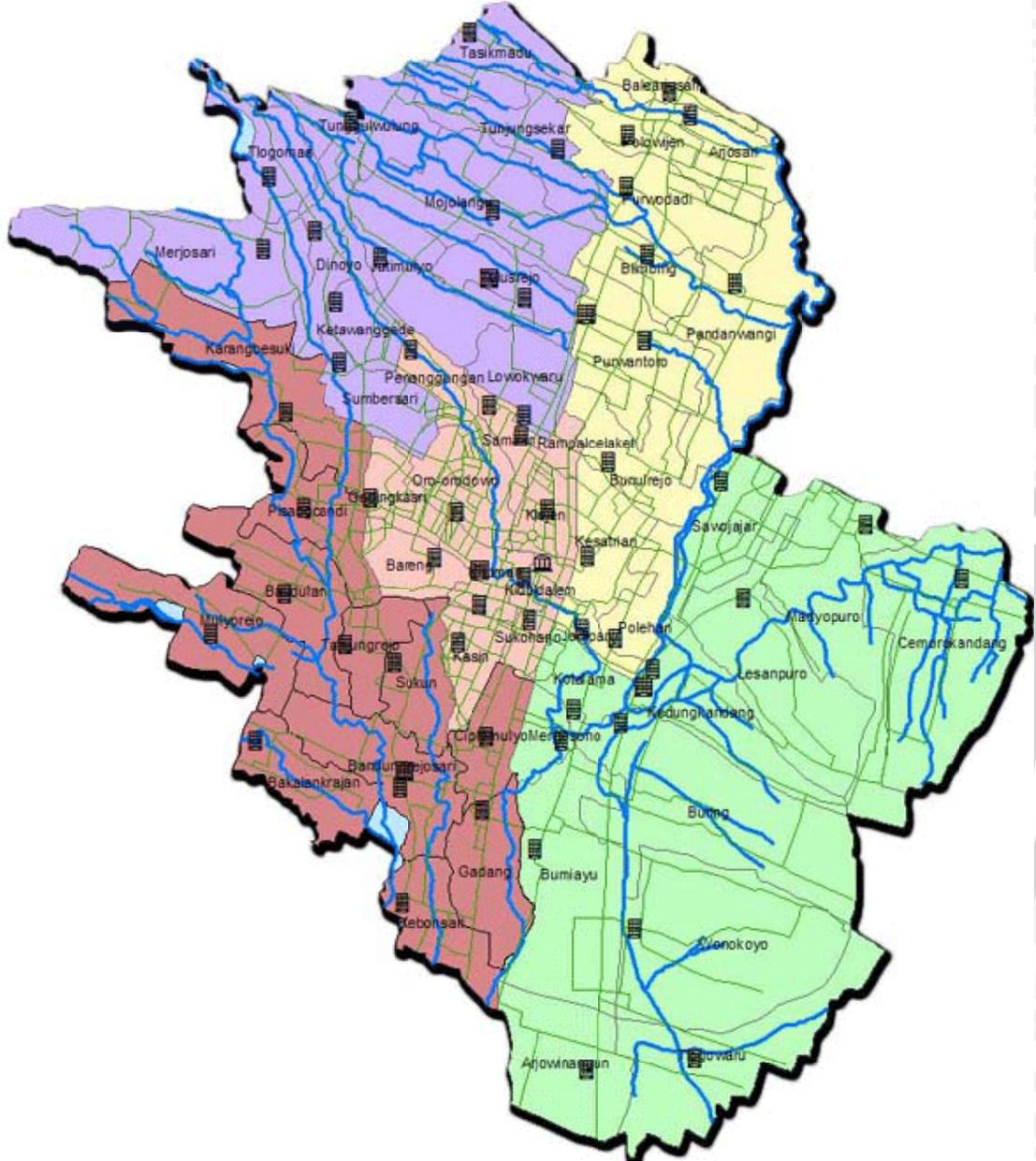
No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km)	Presentase terhadap luas kota (%)
1.	Kedung Kandang	12	39,89	36,25 %
2.	Klojen	11	8,83	8,02 %
3.	Blimbing	11	17,77	16,14 %
4.	Lowokwaru	12	22,60	20,54 %
5.	Sukun	11	20,97	19,05 %
Jumlah		57	110,06	100,00 %

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, BPS Kota Malang Tahun 2005/2006

Berdasarkan pada tabel 2 diatas luas Kota Malang keseluruhan dapat diketahui dari jumlah kelurahan pada tiap-tiap kecamatan serta luas wilayah masing-masing kecamatan. Jumlah keseluruhan sebanyak 57 kelurahan, dan luas secara keseluruhan Kota Malang adalah 110,06 Km, dengan kecamatan terluas, yaitu Kecamatan Kedung Kandang dengan luas 39,89 Km atau sekitar 36,25% luas keseluruhan Kota Malang, serta kecamatan terkecil adalah Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 Km atau sekitar 8,02% luas keseluruhan Kota Malang.

Berikut adalah peta wilayah Kota Malang berdasarkan wilayah administratif per kecamatan :

Gambar 1  
Peta Wilayah Kota Malang



Keterangan

[www.pemkot-malang.go.id](http://www.pemkot-malang.go.id)

-  : Kecamatan Klojen
-  : Kecamatan Lowokwaru
-  : Kecamatan Kedungkandang
-  : Kecamatan Blimbing
-  : Kecamatan Sukun
-  : Sungai
-  : Jalan Darat

#### **d. Kondisi Sosial Budaya**

Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Kota Malang cukup heterogen dalam hal etnis dan latar belakang budaya, sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan kota yang cenderung dinamis. Etnis masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari beberapa etnis, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa dan Madura dan keturunan arab dan cina. Bahasa pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa Malang, bahasa madura dan bahasa Indonesia.

Sebagai salah satu ikon Kota Pendidikan, masyarakat Kota Malang dengan budaya lokalnya telah lama berinteraksi dan berasimilasi dengan adat dan tradisi dari berbagai etnis yang berdatangan. Kebanyakan pendatang yang datang di Kota Malang adalah dari kalangan pelajar/mahasiswa, pedagang serta dari kalangan lain yang menetap di Kota Malang dalam beberapa kurun waktu tertentu dan kembali ke daerah asal mereka. Untuk golongan pedagang dan pekerja sebagian besar berasal dari wilayah sekitar Kota Malang. Sedangkan untuk kalangan pelajar/mahasiswa banyak berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Kalimantan.

Kota Malang terkenal dengan semboyan Tri Bina Cipta, yaitu sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan sebagai Kota Pariwisata, ini cukup menjadi bukti profil potensi perekonomian Kota Malang itu sendiri, juga sebagai konsep pembangunan kota yang memiliki keutuhan dan keselarasan ide terhadap arah tujuan Kota Malang. Pemerintah Kota Malang konsisten dengan pembangunan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang terdidik secara utuh dan lengkap melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal, sehingga mampu menjadi insan manusia yang dapat mengangkat derajat dan kemakmuran bangsa melalui olah pikir yang maju dan kritis dan kreasi manusia di dunia pemerintahan, perekonomian, perdagangan dan sebagainya. Masyarakat yang terdidik dan masih teguh memegang tradisi serta sikap toleransi dan ramah tamah yang masih melekat pada tradisi menjadikan Kota Malang sebagai kota yang siap

terhadap pembangunan. Persebaran penduduk Kota Malang berdasarkan kecamatan pada tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Kepadatan Penduduk Kota Malang /Km2**

No.	Kecamatan	Luas	Persentase thd Luas Kota	Penduduk	Kepadatan Penduduk /Km2
1.	Kedung Kandang	39,89	36,25 %	172,663	4,328
2.	Klojen	8,83	8,02 %	106,075	8,004
3.	Blimbing	17,77	16,14 %	164,933	2.013
4.	Lowokwaru	22,60	20,54 %	186,592	9.282
5.	Sukun	20,97	19,05 %	167,641	8.256
Kota Malang Tahun 2005		110.06	100.00 %	798,104	7.252
Kota Malang Tahun 2004		110.06	100.00 %	780,863	7.093

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, BPS Kota Malang Tahun 2005/2006

Jika dilihat dari data yang disajikan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut hasil proyeksi penduduk Tahun 2005, penduduk Kota Malang berjumlah 798.104 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 397,829 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 400.276 jiwa. Sesuai dengan pola penyebaran pada 5 (lima) kecamatan di Kota Malang diketahui bahwa pada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sejumlah 186.592 jiwa, diikuti Kecamatan Kedungkandang sejumlah 172.663 jiwa, Kecamatan Blimbing mencapai 164.933 jiwa terakhir adalah Kecamatan Klojen dengan 106.075 jiwa penduduk.

Dari ke lima kecamatan tersebut diketahui bahwa wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat pada Kecamatan Klojen, mencapai 12.013 jiwa per Km2. Kecamatan Kedungkandang adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tetapi karena luas wilayahnya yang sangat luas menjadilkan sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah, hanya berkisar 4.328 jiwa per Km2.

## e. Pemerintahan

### 1. Visi Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada PROPEDA dimana di dalamnya termuat Visi Kota Malang, yaitu :

#### **"TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG MANDIRI, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**

1. Mandiri, artinya bahwa kedepan Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber daya lokal (SDA, Potensi Daerah SDM yang dimiliki).
2. Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang dan mengembangkan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju kota Metropolitan.
3. Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan di Kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota, baik secara materiil maupun spirituil.
4. Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang.

### 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut, penjabaran Misi Kota Malang adalah :

1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;
2. Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
3. Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada:

negara dengan pondasi system kehidupan ekonomi, social, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan social dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang;

5. Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan system politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
6. Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan system administrasi publik dan system administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistic, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat;
7. Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
8. Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi georafis strategis, dan sumberdaya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

### **3. Organisasi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada di daerah tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi pemerintah, maka perlu didukung dengan struktur organisasi pemerintahan yang kuat.

Struktur pemerintahan eksekutif pada Pemerintah Kota Malang dipimpin langsung oleh seorang walikota. WaliKota Malang mempunyai wakil walikota yang membantu walikota dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, walikota juga mempunyai koordinasi langsung dengan sekretaris kota. Seorang sekretaris kota membawahi dua orang asisten, yaitu asisten administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan

Kehidupan pemerintahan eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Malang didukung oleh sejumlah organisasi perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah yang termasuk dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Malang. Organisasi perangkat daerah ini terbentuk dengan landasan hukum peraturan daerah yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat keputusan walikota untuk masing-masing organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah tersebut meliputi :

### **Bagian**

1. Bagian Humas
2. Bagian Sosial
3. Bagian Hukum
4. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
5. Bagian Umum
6. Bagian Organisasi
7. Bagian Keuangan
8. Bagian Pembangunan
9. Bagian Lingkungan Hidup
10. Bagian Perlengkapan
11. Bagian Kas dan Kekayaan Daerah

### **Dinas**

1. Dinas Pendapatan
2. Dinas Pasar
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Pariwisata Informasi Dan Komunikasi
5. Dinas Ketenagakerjaan
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi
7. Dinas Perijinan
8. Dinas Pendidikan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Perhubungan

11. Dinas Pertanian
12. Dinas Kebersihan
13. Dinas Pertanian
14. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah
15. Dinas Pengawasan Bangunan Dan Pengendalian Lingkungan

### **Badan Dan Kantor**

5. Kantor Perpustakaan Dan Arsip
6. Kantor PDE
7. Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana
10. Badan Perencanaan Pembangunan
11. Badan Pengawasan
12. Badan Kepegawaian Daerah
13. Badan Urusan Tanah Dan Rumah
14. Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat

## **2. Gambaran Umum Bagian Humas Kota Malang`**

### **a. Humas Kota Malang**

Fungsi kehumasan atau public relations tidak dapat dipisahkan dari public opini (opini publik), karena fungsi kehumasan diantaranya adalah mengelola opini publik dalam rangka menciptakan opini publik yang farolable, menumbuhkan keinginan baik (good will), dan partisipasi keterlibatan dari publik.

Oleh karena itu peranan komunikasi yang dibangun melalui fungsi kehumasan sangatlah penting bagi pemerintah. Langkah langkah dimaksud diarahkan dan diharapkan untuk mencapai satu harmonisasi serta sinkronisasi antara rumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan aspirasi yang tumbuh di masyarakat. terlebih dengan dilaksanakannya Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, dimana peran dan keterlibatan masyarakat menjadi lebih dominan, maka peran Humas sebagai jembatan penghubung diantara program pembangunan

serta kebijakan pemerintah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat menjadi semakin penting.

Dengan demikian maka fungsi kehumasan sebagaimana dituangkan dalam keputusan walikota nomor 1 tahun 2001 perlu dioptimalakan adapun fungsi yang dimaksud diuraikan sebagai berikut, bagian Humas mempunyai fungsi : “melaksanakan urusan pemberitaan, urusan dokumentasi, urusan sandi dan telekomunikasi serta pembinaan masyarakat kedalam dan keluar dalam rangka memperjelas kebijakan kepala daerah”.

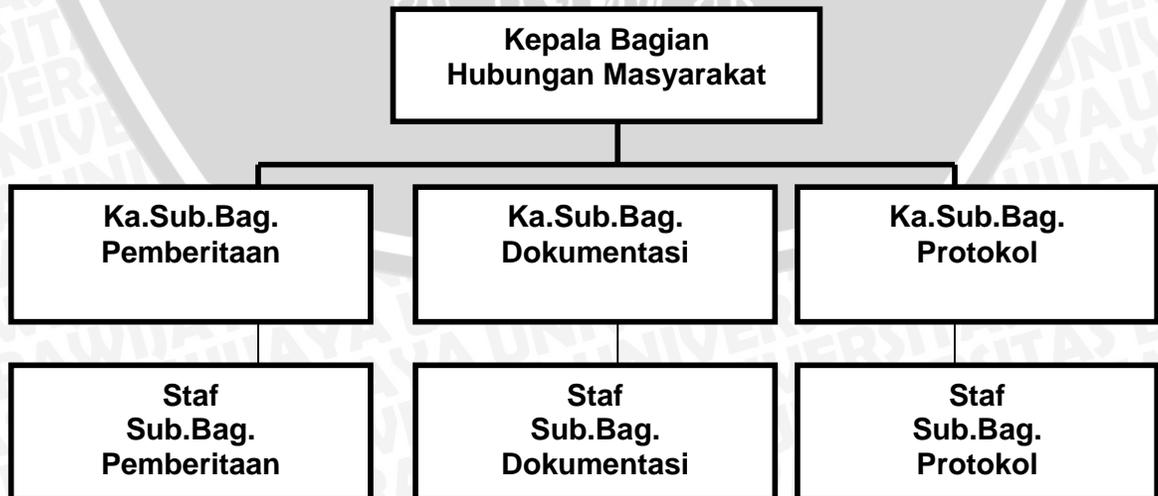
**b. Struktur Organisasi Bagian Humas**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang; maka Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Malang yang secara hierarkhis dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, memiliki strutur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
2. Kepala Sub Bagian Pemberitaan
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi
4. Kepala Sub Bagian Protokol

*Bagan organisasi :*

**Bagan 3  
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUMAS  
KOTA MALANG**



Sumber : Bagian Humas Kota Malang tahun 2009

### c. Tugas Pokok dan Fungsi Humas

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Kota Malang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan pemberitaan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Bagian Hubungan Masyarakat sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah.
- b. Pengumpulan bahan pemberitaan daerah dan pelaksanaan kegiatan kehumasan daerah.
- c. Penyusunan dan penyediaan naskah sambutan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
- d. Pengumpulan usul, kritik, saran dan pendapat masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- e. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan Keprotokolan.
- f. Penyiapan dan pengaturan kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah serta pengelolaan dan pengembangan kepustakaan sekretariat daerah.
- h. Pengelolaan tanda penghargaan
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- j. Penyusunan bahan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sekretariat Daerah dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sekretariat Daerah.
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan keprotokolan dan pemberitaan pemerintah daerah.
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional

- n. Pengelolaan kepastakaan dan kearsipan
- o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait ayanan publik secara berkala melalui web site pemerintah daerah.
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta fungsi.
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya melalui asisten administrasi umum.

**d. Visi Dan Misi Humas**

Dengan mendasarkan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang dan tetap berpijak dalam kerangka sinergitas dan harmonisasi dengan rencana strategi Kota Malang, maka ditetapkan

***Visi Bagian Humas :***

**“”TERJALINNYA KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA MALANG YANG HARMONIS, LUAS DAN MANTAP”**

Dengan *misinya* ;

1. Mewujudkan peran kelembagaan Humas yang berkualitas, kuat dan meluas.
2. Mengembangkan pemberitaan daerah dan publikasi kebijakan Kepala Daerah serta kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Mendayagunakan secara optimal naskah sambutan Kepala Daerah sebagai sarana publikasi kebijakan serta kegiatan Pemerintah Daerah.
4. Membangun hubungan kelembagaan dalam rangka menumbuhkan pemahaman yang tepat dan benar tentang Pemerintah Kota Malang.
5. Mengembangkan sistem dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah secara terpadu, sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

6. Mengembangkan dan mewujudkan tata kegiatan Pemerintah Kota yang sistematis, terpadu, terpola sebagai bagian dari performance dan citra Pemerintah Kota
7. Mengembangkan sistem persandian dan telekomunikasi daerah yang terpadu, untuk memantapkan pola komunikasi, koordinasi dan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah

#### **e. Sasaran dan Tujuan Humas**

Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Memperjelas kebijakan Kepala Daerah serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai unsur Jajaran Pers dari media cetak dan elektronik, masyarakat dan perangkat daerah
2. Kegiatan Kepala Daerah yang memnuhi prinsip keteraturan
3. Peralatan komunikasi perangkat daerah, DPRD dan rumah Dinas Walikota sebagai pendukung percepatas arus informasi dan komunikasi

Tujuan bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Malang yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperjelas kebijakan kepala daerah
2. Menciptakan hubungan yang harmonis atara bagian Humas dengan masyarakat, unsure pers secara timbale balik dan berimbang
3. Terwujudnya keteraturan jadwal maupun kegiatan kepala daerah
4. Terpeliharanya alat sandi dan telekomunikasi dan percepatan arus komunikasi.

#### **f. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Humas**

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Malang membawahi :

1. Sub Bagian Pemberitaan
2. Sub Bagian Dokumentasi

### 3. Sub Bagian Protokol

Dimana masing masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian. Dan Sub Bagian tersebut diatas masing masing mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Sub Bagian Pemberitaan

Sub Bagian Pemberitaan melaksanakan tugas pokok pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan Walikota dan mendistribusikan bahan bahan informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas maka Sub Bagian Pemberitaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bahan pemberitaan sesuai dengan kebijakan Walikota
- b. penyiapan kegiatan pers dan media massa dan penyiapan rencana peliputan acara kegiatan walikota.
- c. Penyusunan dan penyajian berita tentang kegiatan pemerintah daerah / Walikota
- d. Penyusunan bahan pemberitaan mengenai kegiatan Pemerintah Daerah / Walikota untuk mendistribusikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang
- e. Pengumpulan , penyusunan dan penyajian informasi terkait dengan kebijakan dan kegiatan pemerintah kota
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kehumasan keprotokolan dan pemberitaan Pemerintah Daerah.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sub Bagian Dokumentasi

Sub Bagian Dokumentasi melaksanakan tugas pokok pengelolaan dokumentasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah. Dan untuk melaksnakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Sub Bagian Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. pendokumentasian kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk audio visual

- b. penyiapan dan pelaksanaan dokumentasi foto kegiatan pemerintah kota
- c. penghimpunan dan pendokumentasian data informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota
- d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan walikota dan sekretaris daerah serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dinas
- e. pelaksanaan pendataan, penghimpunan, pengelolaan dan pendokumentasian tanda penghargaan
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bagian Protokol**

Sub Bagian Protokol melaksanakan tugas pokok penyusunan acara dan urusan keprotokolan bagi walikota dan yang berhak menerima layanan keprotokolan lainnya. Dan untuk melaksanakan tugas pokok diatas maka Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyiapan, pengaturan pelaksanaan dan penyediaan seluruh bentuk acara yang akan dilaksanakan oleh Walikota dan yang berhak menerima layanan keprotokolan lainnya
- b. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu tamu Walikota dan yang berhak menerima pelayanan keprotokolan lainnya.
- c. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai tugas dan fungsinya.

### **g. Kegiatan Humas Kota Malang**

Program dan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat untuk tahun anggaran 2009 sampai 2013 dapat dilihat dari tabel program Bagian Hubungan Masyarakat sebagai berikut berikut :

**Tabel 3**  
**KEGIATAN BAGIAN HUMAS KOTA MALANG**  
**TAHUN 2009-2013**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM /KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN
1	Pengembangan fungsi dan peranan kehumasan serta peningkatan pelayanan informasi, publikasi dan pemberitaan	Pengembangan Humas dan pemberitaan daerah	a. publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota Malang b. pembuatan majalah pemerintah kota c. pembuatan buku profil kota d. pelaksanaan wisata jurnalistik e. penyelenggaraan workshop kehumasan	2009-2013
2	Kebijakan pengembangan fungsi dan pelayanan dokumentasi kegiatan pemerintah kota	Pengembangan system dokumentasi	a. dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota Malang b. pembuatan dokumentasi audio visual profil kota c. pembuatan data dokumentasi tanda penghargaan	2009-2013
3	Kebijakan fungsi protokoler	Pengembangan system keprotokolera	a. pembuatan buku pedoman tata kegiatan di	2009-2013

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM /KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN
			lingkungan Pemerintah Kota Malang b. penyelenggaraan workshop protokol	
4	Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana informasi, publikasi dan dokumentasi	Pengembangan system komunikasi, publikasi, informasi dan dokumentasi	a. pengembangan jaringan Local area Network b. pengembangan sarana percetakan/publikasi pemerintah daerah c. pengembangan peralatan dokumentasi	2009-2013

Sumber : Bagian Humas Kota Malang tahun ,2009

### **3. Peran Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan Good Governance**

Good Governance yang sedang gencar digalakkan oleh Pemerintah Kota Malang, yang tentunya berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasarnya sedang berjalan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Malang saat ini telah memiliki kapasitas untuk mengungkapkan informasi secara langsung. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kantor Humas yang memiliki tugas melakukan manajemen media massa, pembangun citra, jembatan pemerintah dengan masyarakat, serta penghubung pemerintah dengan pers.

Humas Kota Malang sejalan dengan pelaksanaan Good Governance tersebut dalam tugasnya menciptakan hubungan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya media massa. Dengan penyebaran dan pengambilan informasi melalui media massa yang dapat dipercaya maka dapat tercipta suatu arus informasi dapat memperlancar kegiatan pemerintahan di Kota Malang.

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan penegakan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan prinsip dasar Good Governance, Humas Kota Malang sebagai badan yang mempunyai peran sebagai mata, telinga, dan mulut pemerintah daerah ini sedang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagai mata berarti Humas berkemampuan melihat, mencermati, kepekaan atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai telinga Humas berkemampuan untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan sebagai mulut Humas berkemampuan untuk menyampaikan kebijakan secara tepat.

Dengan Humas Kota Malang memiliki peran tersebut maka pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan penegakan aspirasi masyarakat dapat terwujud. Dan tentunya tidak lepas dari peran aktif media massa dalam tugasnya menyebarkan informasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun pihak swasta kepada pemerintah daerah Kota Malang. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak M. Nurwidiyanto, S.Sos selaku Kepala Subbagian Humas Kota Malang

”Kota Malang lebih mengutamakan kemitraan dengan media massa dan memposisikan media menjadi jembatan kepada publik. Tak ketinggalan pihak swasta, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota itu tidak pilih kasih, mencakup semua elemen masyarakat secara menyeluruh. dengan informasi yang disampaikan oleh media masa, elemen-elemen tersebut dapat melakukan kontrol kepada masyarakat dengan memberikan umpan balik kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan”.

(23 Januari 2009, Pukul 09.00 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Pernyataan tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Diah, selaku staff Humas Kota Malang yaitu Sebagai berikut :

“ Dalam menciptakan pemerintahan Good Governance, Humas memang memegang peranan penting sebagai penyalur aspirasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal itu dapat dilihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang secara aktif menggunakan media massa dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya untuk mendapatkan informasi atau berita terkini mengenai program, kebijakan atau kejadian-kejadian terbaru”

(23 Januari 2009, Pukul 10.00 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Dengan semangat perubahan menuju pemerintahan yang baik, maka peran bagian Humas Kota Malang untuk menciptakan hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta sangatlah penting. Dalam bidang pelayanan publik, masyarakat ataupun pihak swasta menuntut sistem pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan yang sangat memperhatikan aspirasi masyarakat. Masyarakat berhak atas informasi yang dibutuhkan, sebaliknya Humas dengan menggunakan akses media massa wajib menjamin informasi tersebut terjaga dan terkontrol agar tidak menimbulkan pandangan negative yang mungkin akan ditimbulkan. Untuk itu Humas Kota Malang sedang berusaha untuk menumbuhkan citra positif pemerintah daerah serta menjalin kerja sama dengan pers agar tercipta pemberitaan yang transparan, berimbang, bermanfaat, dan bertanggung jawab.

### **1. Fungsi Media Massa Bagi Humas Kota Malang**

Media massa merupakan sarana komunikasi yang paling efektif di era kemajuan teknologi saat ini, terutama dalam hal penyampaian dan penyebaran informasi. Dimana proses penyampaian informasi dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan kepada masyarakat secara keseluruhan tersebut dapat berjalan lancar dengan adanya media massa sebagai media penghubung. Hal ini sesuai

dengan pernyataan dari Kepala Sub Bagian Pemberitaan Bagian Humas Kota Malang bapak M. Nurwidiyanto, S.sos menyatakan :

” Bahwa media massa mempunyai 3 fungsi yang paling utama yaitu :informatif, edukatif, Dan rekreatif. Dimana ketiga fungsi tersebut digunakan oleh media massa untuk menyebarkan informasi sampai titik terluas, oleh karena itu media masaa menjadi salah satu sarana efektif penyampaian informasi kebijakan dan pembangunan, itu apabila dilihat dari perspektif pemerintah kota. sedangkan pada perspektif masyarakat ( publik) media massa menjadi sarana bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran kepada pembuat kebijakan, hal ini merupakan proses interaktif antara pembuat kebijakan dengan masyarakat melalui media massa”  
(14 Januari 2009, Pukul 11.00 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Berdasarkan penyataan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas, media massa menggunakan fungsinya yaitu informatif, edukatif, Dan rekreatif, dimana ketiga fungsi tersebut digunakan media massa secara tepat dan berimbang. Hal tersebut dimaksudkan agar media massa mampu menjadi sarana Pemerintah Kota Malang yang memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, sehingga akan semakin diminati oleh masyarakat. Dengan demikian akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dengan media massa yang berperan efektif untuk mewujudkan suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dengan kata lain menggunakan media massa sebagai sarana penghubung dengan pemerintah, sehingga timbul proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah semakin bejalan dengan harmonis.

Fungsi media massa yang terbagi menjadi 3 fungsi ini merupakan komponen penting dalam penerapan lebih lanjut media massa. Seperti halnya fungsi informatif, dalam fungsi ini media massa bersifat memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Media massa akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari tertentu, memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam proses pemerintahan di Kota Malang, atau mungkin juga memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi. Dan fungsi edukatif, yaitu media massa yang bersifat memberikan informasi mengenai hal-hal yang mendidik masyarakat dengan pemberian informasi tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreatif, dimana dalam fungsi ini media massa memberikan informasi yang

bersifat menghibur, namun dalam fungsi ini diharapkan tidak hanya semata-mata menghibur saja, namun ada unsur pendidikan dan informasi di dalamnya.

Dalam perkembangannya media massa juga sering dikatakan memiliki peran sebagai "anjing penjaga" dan berdiri di sisi yang berlawanan dengan pemerintah. Salah satu manfaat utama media massa yang bebas dalam sistem demokrasi sering dinyatakan dengan kewajiban untuk menyediakan informasi pada masyarakat mengenai kinerja pemerintah. Dalam hal ini media massa mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal penyampaian informasi yang tepat, akurat dan berimbang kepada masyarakat secara luas. Dalam ruang lingkup pemerintahan daerah Kota Malang media massa diperlakukan sebagai rekan kerja atau partner dalam proses pemerintahan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Diah selaku staff di Bagian Humas Kota Malang, dimana Beliau menyatakan bahwa :

"Seperti yang diketahui media massa setiap harinya pasti akan digunakan oleh hampir semua warga Kota Malang pada khususnya dan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu media massa dapat dikatakan memiliki fungsi yang vital terkait proses penyelenggaraan pemerintah. Karena didalamnya akan menjadikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi lebih transparan dan saling mendukung"

(14 Januari 2009, Pukul 11.30 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Media massa mempunyai fungsi yang strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Dengan adanya media massa selaku penyampai informasi, maka masyarakat secara luas mendapatkan informasi-informasi mengenai kebijakan pemerintah, pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan pemerintahan di Kota Malang. Dengan masyarakat mendapatkan informasi-informasi tersebut maka akan timbul tanggapan, kritik, atau saran dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Malang dan juga melalui media massa. Dimana tanggapan, kritik, dan saran tersebut digunakan Pemerintah Kota Malang dalam proses evaluasi kebijakan dan juga sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.

## 2. Upaya Humas Terhadap Pengembangan Media Massa

### 1. Keterbukaan Informasi

Humas Kota Malang sebagai suatu lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang penyampaian informasi kepada khalayak umum sangatlah membutuhkan media massa dalam penyampaian informasinya. Media cetak maupun elektronik sangat berperan aktif dalam mewujudkan kelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat di Kota Malang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh bagian Humas Kota Malang merupakan bentuk nyata dari pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Pemerintah Kota Malang melalui Bagian Humas membuka akses informasi selebar-lebarnya kepada media massa untuk menyampaikan informasi, baik itu mengenai proses pemerintahan, kebijakan pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Malang. Seperti pernyataan yang disampaikan bapak M. Nurwidiyanto, S.sos selaku Kepala Subbagian Humas Kota Malang :

”dimulai dari era Presiden Habibie, dimana era tersebut menjadi awal keterbukaan informasi, dan memberi angin segar kepada pers. Diikuti dengan kebebasan media untuk mengakses informasi. Humas sejalan dengan semangat itu juga sangat terbuka, dimana Humas memperbolehkan media massa mengakses informasi selama masih dalam koridor tupoksi pemerintah dan masih dalam kaidah kode etik jurnalistik. Humas meletakkan media massa sebagai mitra kerja yang sejajar dan menurut porsinya sebagai media masa”  
(16 Januari 2009, Pukul 09.00 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Dalam prakteknya Humas Kota Malang tidak mempersulit proses pengambilan informasi oleh media massa. Wartawan yang ingin memperoleh informasi seputar pemerintahan Kota Malang bisa dari media massa apa saja. Proses pengambilan informasi bisa dengan wawancara ataupun mengambil informasi yang disediakan oleh Humas Kota Malang. Wartawan yang datang ke bagian Humas dapat langsung mendapatkan informasi tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu wartawan media cetak Kota Malang yang menyatakan sebagai berikut :

“saya memang terbiasa menjadikan Humas Kota Malang ini untuk mencari dan mendapatkan informasi yang khususnya menyangkut berita tentang pemerintahan atau kegiatan pemerintah yang terbaru. Khan klo saya mengambil di bagian Humas ini prosesnya tidak berbelit-belit dan orang-orangnya terbuka dengan wartawan, sehingga ya sangat membantu

pekerjaan saya sebagai pencari berita, namun ya kami memahami memang gak semua berita bisa kami dapat, ada yang memang ditujukan untuk umum ada yang sifatnya rahasia menurut mereka ( pemerintah Kota Malang)”  
(Mbak Diana, 14 januari 2009, pukul 08.00 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Bagian Humas Kota Malang dalam memberikan pelayanan kepada wartawan sangat terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan, namun hal tersebut masih berada dalam koridornya masing-masing. Ada informasi yang sifatnya terbuka bagi siapa saja dan ada juga informasi yang sifatnya rahasia, diamana hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah Kota Malang.

## 2. Siaran Pers

Dalam menjaga keberlangsungan dan eksistensi dari sebuah media massa perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pemberitaan yang aktual dan terpercaya. Humas Kota Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya untuk menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh media massa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. seperti halnya fenomena yang terjadi, aspirasi masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, pembangunan, pendidikan, dan informasi-informasi lainnya.

Melalui informasi yang disediakan Humas untuk media massa, perlu dikemas dengan semenarik mungkin untuk menarik minat media massa yang ada agar bersedia datang dan mengambil berita kepada bagian Humas Kota Malang. Sehingga diharapkan media massa tidak kering berita dan tetap mampu menjalankan perannya dengan sebaik mungkin.

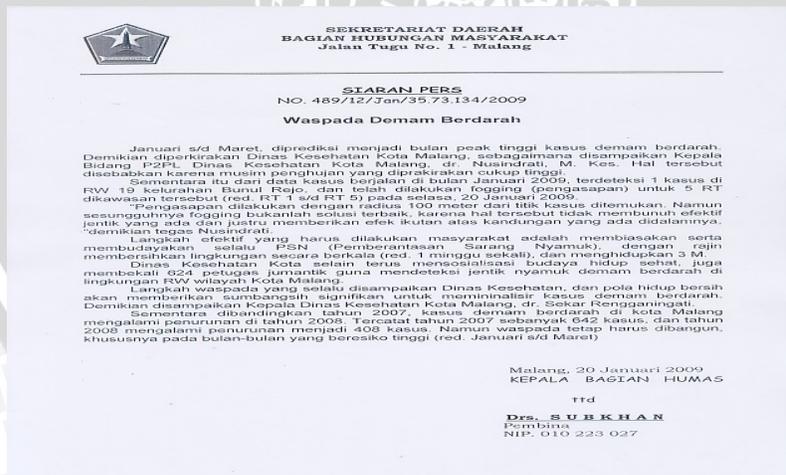
Dalam upaya mempermudah proses pengambilan informasi dari pemerintah oleh media massa adalah dengan Siaran Pers. Dimana dalam siaran Pers ini terdapat informasi-informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga informasi tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat. sehingga media massa yang ingin mendapatkan informasi dari Pemerintah Kota Malang tidak mendapat kesulitan.

Seperti yang dikutip dari pernyataan Ibu Diah selaku staff dan yang menangani penerbitan siaran pers yang menyatakan :

“ Humas juga terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari berita ataupun masyarakat, ya salah satunya dengan menerbitkan siaran pers dimana siaran pers tersebut berisi tentang informasi-informasi mengenai kebijakan, program atau kegiatan, juga isu-isu yang berkembang saat ini. Kadang juga peringatan atau pemberitahuan mengenai hal-hal yang dianggap penting untuk disamapaikan, ya seperti contohnya di daerah xx banyak terjangkit demam berdarah, ya melalui siaran pers ini kami (Humas)memberikan informasi agar masyarakat lebih waspada. Ya biasanya yang mengambil siaran pers ini ya wartawan untuk diterbitkan di Koran atau tabloidnya”  
(14 Januari 2009, Pukul 11.30 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Humas Kota Malang membuat dan menyediakan siaran pers hampir setiap hari. Dan ditujukan kepada wartawan yang akan mendapatkan informasi dari pemerintah. Siaran pers ini dinilai efektif karena penyajiannya dibuat agar media massa yang ingin menerbitkan berita kepada masyarakat tidak melalui proses yang rumit. Siaran pers ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Humas dalam memanfaatkan media massa di Kota Malang.

## Gambar 2 Siaran Pers



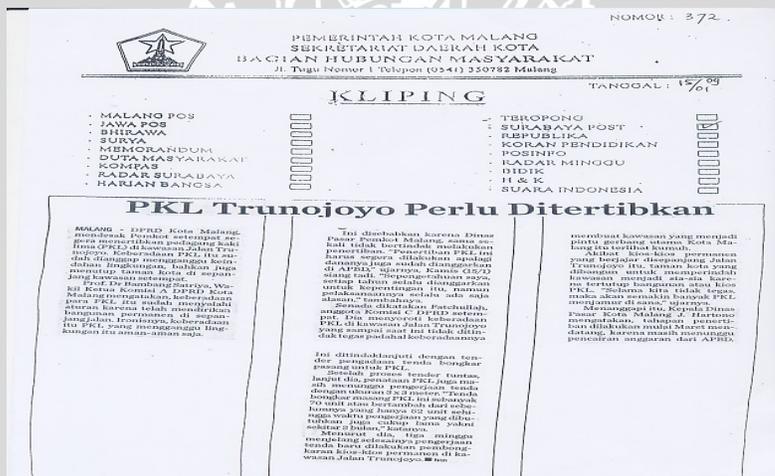
Sumber : Bagian Humas Kota Malang ,2009

### 3. Kegiatan Pengklipingan

Bentuk nyata dari Humas Kota Malang dalam pengembangan media massa adalah dengan membuat kliping mengenai berita yang diterbitkan oleh berbagai media massa, dimana didalamnya terdapat isu-isu yang berkembang dalam masyarakat dan secara aktual dijadikan sebuah dokumen. Kliping yang dibuat tersebut merupakan salah satu alat dan sarana bagi Humas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Kliping-kliping yang telah dijadikan dokumen tersebut akan dianalisa dan dikembangkan lebih lanjut dengan materi-materi lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan aspirasi masyarakat, karena aspirasi masyarakat ada dalam berita yang disuguhkan oleh media massa. Selain itu kliping yang telah terdokumentasikan tersebut juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan kedepannya dari pemerintah. Sehingga dengan demikian hubungan komunikasi yang baik akan tercipta antara masyarakat dengan pemerintah melalui peran media massa.

Kegiatan pengklipingan dilakukan setiap hari dengan pengambilan berita yang berbeda beda. Dalam kegiatan ini lebih ditekankan pada permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. proses pengklipingan ini menggunakan media cetak sebagai sumbernya. Dalam formulir yang dibuat oleh bagian Humas Kota Malang terdapat berbagai macam media cetak yaitu : malang post, jawa post, bhirawa, surya, memorandum, duta masyarakat, kompas, radar surabaya, harian bangsa, teropong, surabaya post, republika, koran pendidikan, posinfo, radar minggu, bidik, H & K, suara indonesia, serta media cetak lainnya yang mungkin akan ditambahkan lagi di daftar pengklipingan.

Gambar 3  
Proses pengklipingan



Sumber : Bagian Humas Kota Malang ,2009

Disamping digunakan sebagai pendokumentasian, kliping juga digunakan sebagai tolak ukur Humas Kota Malang dalam menilai media massa. Karena setiap berita yang didapat dan ditampilkan oleh media massa sangat berpengaruh bagi kondisi dan perkembangan dalam masyarakat. berita yang ada bagi cermin dan acuan bagi masyarakat yang dapat dengan cepat dan mudah berubah serta menjadi fenomena. Oleh karena itu apabila ada kesalahan dalam penyampaian berita harus dapat segera diatasi. Apabila dalam penyebaran informasi media

massa dirasa ada kesalahan atau ketidak tepatan yang memungkinkan menimbulkan kerugian baik masyarakat ataupun pemerintah daerah, maka sudah menjadi tugas Humas untuk melakukan konfirmasi kepada media massa yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan media massa dapat merespon dan memperbaiki kesalahan yang ada tanpa merugikan berbagai pihak.

#### **4. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Humas Kota Malang.**

Dalam suatu program atau gagasan, pasti terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang. Begitu halnya dengan peran hubungan masyarakat Kota Malang dalam memanfaatkan media massa guna mewujudkan Good Governance ini akan berjalan lancar bila dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa faktor penunjang yang dapat mempermudah dengan berbagai manfaat yang diperoleh baik dari segi produk, sarana dan manusia sebagai subjek sekaligus objek kegiatan. Tetapi hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari adanya faktor-faktor penghambat, yang menjadi permasalahan dan kendala pelaksanaan peran Hubungan Masyarakat (Humas) selama ini. Sehingga dua komponen ini menjadi hal penting untuk disajikan dengan baik agar dapat menjadi wacana bagi semua pihak dengan permasalahan yang selama ini ada. Yaitu dengan mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada, dan meningkatkan beberapa faktor yang dapat mendukung peran Hubungan Masyarakat Kota Malang dalam mengembangkan media massa untuk mewujudkan Good Governance tersebut.

##### **a. Faktor Pendukung**

##### **1. Undang- Undang Pers No 40 Tahun 1999**

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pres ini, merujuk pada Undang-undang dasar 1945, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 dan pasal 28. selain itu juga berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pres ini dijelaskan bahwa Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang menjunjung tinggi akan adanya kebebasan pers yang merupakan wujud pengembangan kedaulatan rakyat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Sehingga akan terjaminnya kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, dan untuk mendapatkan kebebasan dalam mendapatkan informasi dengan media massa melalui Pres.

Pres itu sendiri meliputi dua jenis media, yaitu media cetak dan media elektronik, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini mengenai Ketentuan Umum sebagai berikut :

“ Pres adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. “

Pres juga memiliki hak-hak yang mutlak dan Kewajiban dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya seperti halnya Hak Tolak yang merupakan hak dari wartawan karena profesinya untuk menolak adanya pengungkapan nama atau identitas lainnya dari sebuah sumber berita yang memang harus dirahasiakannya. Hak Jawab, yang merupakan hak dari seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dan yang ketiga adalah hak Koreksi, yang merupakan hak dari setiap orang untuk mengoreksi atau membenarkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pres, hal itu baik tentang dirinya sendiri ataupun tentang orang lain. Selain itu Pres juga memiliki Kewajiban Koreksi untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, opini, dan atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh Pres yang bersangkutan sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada.

Sementara itu undang-undang ini juga menjelaskan sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat, maka Pres harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Sebagaimana terkait dengan fungsi Pres yang berupaya untuk dapat menjadi media informasi, pendidikan hiburan dan kontrol yang baik bagi masyarakat secara nasional.

Untuk lebih memperjelas substansi dari kebebasan Pres, maka Undang-Undang ini terbagi dalam 8 (delapan) Bab yang meliputi :

- a. Bab I yaitu mengenai Ketentuan Umum
- b. Bab II yaitu mengenai Asas, Fungsi dan Hak Peranan Pres

- c. Bab III yaitu mengenai Wartawan
- d. Bab IV yaitu mengenai Perusahaan Pres
- e. Bab V yaitu mengenai Dewan Pres
- f. Bab VI yaitu mengenai Pres asing
- g. Bab VII yaitu mengenai Peran Serta Masyarakat
- h. Bab VIII yaitu mengenai Ketentuan Tindak Pidana

Kedelapan Bab dalam Undang-Undang tersebut memiliki keterikatan antara yang satu dengan yang lain dalam pelaksanaannya, karena bagaimanapun juga merupakan satu komponen yang sangat berpengaruh dalam menjaga kebebasan Pres sebagaimana mestinya.

Sementara itu untuk menghindari akan terjadinya pengaturan yang cenderung tumpang tindih, maka Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini tidak mengatur segala ketentuan yang memang sudah di atur dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah ada.

Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pres dapat dikatakan sangat menunjang dan menjadi faktor pendukung bagi Peran Hubungan Masyarakat (Humas), khususnya di daerah Kota Malang ini dalam mengembangkan media massa guna mewujudkan Good Governance.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat mempunyai peran yang berpengaruh bagi perkembangan Humas dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya karena pada hakikatnya masyarakat merupakan satuan objek dan sekaligus menjadi subjek bagi sebuah informasi. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat merupakan cerminan dari keberhasilan media massa menyajikan sebuah informasi dan Humas sebagai salah satu wahana publik yang melihat mencermati/kepekaan atas fenomena yang terjadi di masyarakat dan mampu mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta berkewajiban untuk menyampaikan kebijakan secara tepat.

Dengan kata lain masyarakat dapat menunjang peran Humas dalam memanfaatkan media massa untuk mewujudkan Good Governance. Yang di antaranya melalui kegiatan menggunakan media massa dalam keseharian, ikut memantau dan melaporkan analisis dan pemberitaan yang dilakukan oleh media

massa serta dengan menyampaikan saran dan kritik baik kepada media massa ataupun kepada pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Seperti halnya masyarakat Kota Malang yang menjadi sumber penelitian ini juga menunjukkan bahwa melalui partisipasi masyarakat yang baik maka akan menunjang peran Humas dalam memanfaatkan media massa, hal ini terlihat dari hampir semua orang yang menggunakan media massa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap harinya. Sebagaimana beberapa pernyataan masyarakat sebagai berikut :

“ Saya setiap hari menggunakan media massa, ya yang paling sering saya cari tentu berita mengenai pemerintahan karena terkait dengan pekerjaan saya di dalam Perhutani. Sehingga saya juga dapat dengan mudah mengikuti perkembangan yang ada terutama terkait dengan pemerintahan dan pembangunan baik di Kota Malang maupun secara Nasional.” (Bapak Soenyoto, PBI, 7 Februari 2009)

“ Kalau saya hampir setiap hari selalu melihat televisi dan biasanya informasi yang saya cari adalah tentang hiburan” (Dimaz, Pisang Candi, 3 Februari 2009)

“ Setiap hari saya selalu meng *Up date* berita-berita tentang olahraga melalui radio, karena saya sangat suka olahraga dan saya juga selalu memperhatikan perkembangan olahraga terkini yang ada khususnya di Kota Malang.” (Yoga Hayu, Klayatan, 11 Februari 2009)

“ Biasanya saya suka membaca koran setiap hari terutama tentang berita kriminalitas, ya buat nambah informasi dan biar tetap waspada kan sekarang banyak sekali bentuk kejahatan yang sangat membahayakan. (Rangah, Zaenal Zakse, 17 Februari 2009)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, jelas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan media massa. Meskipun media yang digunakan berbeda-beda, karena bagaimanapun media dibedakan menjadi media cetak dan media elektronik.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat ini muncul atas kesadaran akan pentingnya sebuah informasi dalam kehidupan dan tuntutan zaman dan perubahan yang ada serta meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa perkembangan media

massa terutama di Kota Malang telah menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, bukan hanya pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat, media massa itu sendiri dan pihak-pihak swasta.

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Dhevi, sebagai berikut : “ Saya rasa semua pihak ikut bertanggung jawab atas perkembangan media massa, terutama pemerintah kota harus lebih aktif lagi dalam memajukan media massa terlebih dalam bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan di televisi.” ( PBI, tgl 13 Februari 2009)

Hal yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh Bapak Yohanes Putra yang memiliki pekerjaan swasta Singgih sebagai mahasiswa. “ memang sebenarnya semua pihak itu mempunyai peran masing-masing dalam meningkatkan kemajuan media massanya, apalagi sekarang semakin banyak pihak swasta yang juga ingin berprofesi di bidang media massa.” (Sukun,11 Februari 2009)

“ Ya semua pihak itu sudah seharusnya membantu Pemkot dalam memajukan media massa, jadi informasi yang dihasilkan juga bisa lebih mencukupi kebutuhan masyarakat setiap harinya. “ (Sukun,11 Februari 2009)

Partisipasi masyarakat ini akan semakin meluas jika media massa dapat menyajikan berita dan informasi secara lebih aktual, cepat, terpercaya, menarik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pendidikan, hiburan, olahraga, kriminalitas dan bidang-bidang lainnya. Sehingga Humas pun dapat menjalankan peranannya dalam mengembangkan media massa melalui program-program, sasaran dan berbagai kegiatan baik yang akan, sedang dan telah selesai dijalankan.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki bagian Humas Kota Malang dalam menunjang proses penyebaran informasi dan dalam melakukan tugas-tugasnya dirasa kurang optimal. Seperti yang tertuang dalam Renstra Bagian Humas Kota Malang tahun 2009-2013 bab III B sebagai berikut:

Dengan memperhatikan pergerakan pembangunan, perkembangan kebutuhan masyarakat, keterbatasan anggaran dengan ekspektasi yang diharapkan serta perkembangan global yang makin kompetitif, maka

langkah pencitraan bagi Pemerintah Kota Malang Program perlu terus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karenanya, kegiatan penyebarluasan informasi perlu terus didorong secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga Bagian Humas dipandang perlu untuk memiliki perangkat yang mendukung aplikasi teknologi informasi sesuai kualitas layanan informasi yang ingin diberikan di masa yang akan datang. Selain itu, penyebarluasan informasi juga harus mengikuti perkembangan teknologi digital, sehingga segala macam bentuk media informasi, baik gambar tetap (*still picture*) berupa spanduk, banner, cetak foto, ataupun gambar bergerak (*moving picture*) semua harus sudah berimigrasi kepada teknologi digital, bukan lagi analog.

Dengan mengacu pada renstra yang dibuat oleh Humas Kota Malang tersebut dapat diketahui yaitu, kendala yang dihadapi oleh Humas adalah sarana dan prasarana yang dianggap masih kurang dalam menunjang kegiatan kehumasan. Kinerja Humas yang begitu padat dan perannya dalam memanfaatkan media massa sangatlah perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, modern, dan sesuai dengan perkembangan jaman. Di era kemajuan teknologi saat ini Humas Kota Malang perlu memiliki perangkat-perangkat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sebaik-baiknya demi menunjang kelancaran arus informasi.

Berikut daftar sarana prasarana yang dimiliki bagian Humas Kota Malang

**Tabel 4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**  
**Bagian Humas Kota Malang**  
**Tahun 2009**

No.	Sarana	Tipe	Jumlah	keterangan
1	Meja kursi	-	23 set	
2	Filing cabinet	-	6	
3	faximile	-	1	
4	Tape recorder	-	2	
5	Komputer	Pentium III	5	Menggunakan Local Area Network
6	Printer	Canon Pixma	2	
7		Epson Stylus R-310	1	
8		Canon MP 340	1	
9	Pesawat Telpon		5 pswt	
10	Mobil Dinas	Kijang	1 unit	
11	Sepeda Motor Dinas	-	3 unit	
12	Kamera	Digital Analog	2 unit 2 unit	
13	Handycam	Sony	1 unit	
14	Pesawat HT	Alt	3 unit	

Sumber : Bagian Humas Kota Malang, 2009

## 2. Sumber Daya Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan proses pemerintahan. Manusia yang berkualitas akan menunjang dan memberi banyak kemudahan dan manfaat, dimana juga didukung oleh kondisi personaliti yang baik, cerdas dan kreatif. Dan sebaliknya

manusia yang pasif dan tidak mempunyai kemampuan yang baik akan menjadi penghambat. Karenanya Sumber daya manusia menjadi faktor penting.

Tetapi justru dalam pelaksanaannya faktor Sumber daya manusia ini menjadi hambatan atau kelemahan, hal ini dikarenakan seperti yang diketahui bangsa Indonesia, aparat pemerintah ada yang masih mempunyai kekurangan dalam hal tingkat pendidikan, kemampuan atau ketrampilan, dan penguasaan teknologi. Terkait dengan berbagai kebatasan tersebut maka akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan.

Dalam sebuah organisasi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia yang ada sangat mempengaruhi proses jalannya organisasi tersebut. Kualitas sumber daya manusia disini lebih di tekankan pada kualitas pendidikan masing-masing karyawan. Sama halnya dengan Bagian Humas Kota Malang, dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan oleh 22 orang staff/karyawan, dimana karyawan tersebut memiliki tugas yang berbeda beda. Dengan rincian 1 (satu) orang berpendidikan S3, 7 (tujuh) orang berpendidikan S1, dan 14 (empatbelas) orang berpendidikan SLTA,

Pada jenjang kepangkatan / golongan, terdiri dari golongan IVa / Pembina sebanyak 1 (satu) orang, golongan IIIId / Penata Tk. I sebanyak 2 (dua) orang, golongan IIIc / Penata sebanyak 1 (satu) orang, golongan IIIb / Penata Muda Tk. I sebanyak 4 (empat) orang, golongan IIIa / Penata Muda sebanyak 3 (tiga) orang, golongan IIc / Pengatur sebanyak 1 (satu) orang, golongan IIb / Pengatur Muda Tk. I sebanyak 3 (tiga) orang, dan golongan IIa / Pengatur Muda sebanyak 6 (enam) orang.

Untuk keterangan lebih lengkap akan disajikan dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 5**  
**DATA PNS BAGIAN HUMAS KOTA MALANG MENURUT**  
**PANGKAT/GOLONGAN**

NO	Nama / NIP /Jabatan	Pangkat / Golongan
1	Drs. SUBKHAN 010 223 027 Kepala Bagian	Pembina IV/a
2	M. NURWIDIANTO S.Sos 510 124 385 Kasubag Pemberitaan	Penata Tk. I III/d
3	Ir. DAHLIANA LUSI RATNASARI 550 013 642 Kasubag Protokol	Penata Tk. I III/d
4	DWI SULISTYANI S.S 510 109 681 Kasubag Dokumentasi	Penata III/c
5	MINAWAR 510 105 112	Penata muda Tk.I III/b
6	SYAHRIAL HAMID S.Sos 170 018 864	Penata muda Tk.I III/b
7	SITI WARIYAH 510 096 425	Penata muda Tk.I III/b
8	DAH EKAWATI S.S 510 138 010	Penata muda Tk.I III/b
9	EDWIN DANIEL S SH 510 125 119	Penata Muda III/a
10	SAMUDJI 510 068 620	Penata Muda III/a
11	ELVIRA RINDRI S SE 510 110 531	Penata Muda III/a
12	PURWANINGDYAH 510 120 286	Pengatur Tk.I II/d
13	MASJKUR 510 128 802	Pengatur II/c
14	YULITA 510 130 158	Pengatur Muda Tk. I II/b
15	YOPPI ZAKARIA HARRIS 510 130 056	Pengatur Muda Tk. I II/b
16	SRI EMI HANDAYANI 510 130 068	Pengatur Muda Tk. I II/b
17	SUNANTO 510 096 365	Pengatur Muda II/a
18	LILIK SULASTRI 510 096 365	Pengatur Muda II/a
19	HERLINDA 510 144 092	Pengatur Muda II/a
20	JUL BUDI WAHYONO 510 162 041	Pengatur Muda II/a
21	SABARIYANTI 510 204 634	CPNS II/a
22	AGUSTIN WULAN N 510 216 601	CPNS II/a

Sumber : Bagian Humas Kota Malang,2009

Dari data Sumber Daya Manusia diatas dapat disimpulkan bahwa Bagian Humas Kota Malang sebagai penyedia informasi-informasi dari pemerintah daerah ke masyarakat kurang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang ada. Menurut Kepala Sub Bagian Humas Bapak M. Nurwidyanto S.Sos yang menyatakan :

” Kendala yang dihadapi Humas Kota Malang salah satunya yaitu sumber daya manusia yang masih kurang memadai, karena Humas sebagai kantor pemberitaan daerah harusnya memiliki Sumber daya manusia yang memiliki ilmu tentang jurnalistik, yang nantinya akan dipakai dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat Kota Malang”  
(16 Januari 2009, Pukul 09.00 WIB, Bagian Humas Kota Malang)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Humas Kota Malang Masih memiliki kendala yang harus sesegera ditangani menyangkut dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Kemampuan dalam hal jurnalistik setidaknya harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada di Humas Kota Malang, karena tugas dan fungsi Humas salah satunya adalah sebagai kantor pemberitaan daerah.

B. u



## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan Good Governance**

Pada era pemerintahan saat ini Good Governance bukanlah menjadi hal yang baru lagi untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam pengertian paling sederhana keberadaan Good Governance dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan kata lain adalah mengikuti atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Good Governance yang sedang gencar juga digalakkan oleh Pemerintah Kota Malang, yang tentunya berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasarnya tersebut sedang berjalan dalam menciptakan pemerintahan yang baik, dengan lebih memenuhi kapasitas untuk keterbukaan dan penyediaan informasi secara langsung sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Kantor Humas yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan manajemen media massa, pembangunan citra, jembatan pemerintah dengan masyarakat, serta penghubung pemerintah dengan pers.

Humas Kota Malang yang memegang peranan penting dalam arus komunikasi antara pemerintah Kota dengan masyarakat ini, tidak akan dapat berjalan seiringan dengan pelaksanaan Good Governance dan mampu mendapatkan hasil yang baik apabila dalam penerapannya tidak melibatkan media massa. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini media massa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pemerintahan, karena lancar tidaknya kegiatan pemerintahan ditentukan oleh media massa. Media massa sebagai lembaga resmi yang mempunyai landasan hukum mempunyai keharusan untuk menyebarkan informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat secara luas.

Dengan pengertian lain pengambilan dan penyebaran suatu informasi dan berita akan menjadi lebih mudah dan maksimal melalui kinerja yang baik dari media massa. Sehingga peran Humas dalam menjembatani kepentingan dan kewenangan pemerintah dengan aspirasi masyarakat melalui media massa akan menciptakan arus komunikasi yang terbuka dan lancar antara berbagai pihak.

Di samping itu terkait dengan upaya dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan menjunjung tinggi penegakan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan prinsip dasar Good Governance, Humas Kota Malang juga bertindak sebagai badan yang mempunyai peran sebagai mata, telinga, dan mulut pemerintah daerah ini sedang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagai mata berarti Humas berkemampuan melihat/mencermati/kepekaan atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai telinga Humas berkemampuan untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan sebagai mulut Humas berkemampuan untuk menyampaikan kebijakan secara tepat.

Dengan semangat perubahan menuju pemerintahan yang baik, maka peran bagian Humas Kota Malang untuk menciptakan hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta sangatlah penting. Dalam bidang pelayanan publik, masyarakat ataupun pihak swasta menuntut sistem pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan yang sangat memperhatikan aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan penyebaran informasi yang akurat, tepat dan terkini tentang kebijakan atau program-program pemerintah seperti dengan siaran pers yang diterbitkan setiap harinya baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik, dan kegiatan pengklipingan yang dilakukan oleh pihak Humas, maka prinsip Good Governance mengenai transparansi telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Malang.

Lebih lanjut lagi Humas dengan menggunakan akses media massa wajib menjamin informasi tersebut terjaga dan terkontrol agar tidak menimbulkan pandangan *negative* yang mungkin akan ditimbulkan sebagai akibat pemberitaan. Untuk itu Humas Kota Malang sedang berusaha untuk menumbuhkan citra positif pemerintah daerah serta menjalin kerja sama dengan pers agar tercipta pemberitaan yang transparan, berimbang, bermanfaat, dan bertanggung jawab.

Sementara itu partisipasi masyarakat dalam hal ini juga merupakan faktor yang sama pentingnya, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas maka setidaknya masyarakat juga merespon dengan baik peran Humas yang telah diterapkan dalam kegiatan pewujudan Good Governance. Masyarakat maupun pemerintah dan Humas serta media massa harus dapat menghormati tugas dan

fungsi masing-masing dengan hormat dan tunduk pada hukum yang berlaku agar tidak terdapat tumpang tindih dan penyelewengan tanggung jawab dan wewenang yang ada dan telah diterapkan.

Dengan demikian arus informasi dari dan kepada masyarakat akan dapat berjalan dengan lebih lancar, dan dengan menjalankan prinsip-prinsip Good Governance diharapkan Humas Kota Malang dapat melaksanakan perannya dengan baik dan dapat membantu pemerintah Kota Malang menuju pemerintahan yang lebih baik, bersih dan transparan. Karena dengan terciptanya hubungan kerjasama yang baik di antara pilar-pilar Good Governance tersebut, yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, maka akan mempermudah terwujudnya Pemerintahan Kota Malang yang Good Governance sesuai dengan visi dan misi Kota Malang selama ini.

#### **a. Fungsi Media Massa Bagi Humas**

Berdasarkan penyajian data diatas maka fungsi media massa bagi Humas Kota Malang tentunya sangat berperan aktif dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Malang. Dengan adanya media massa yang semakin menjamur di Kota Malang maka hal tersebut membantu kinerja Humas dalam melakukan tugas dan fungsinya. Humas sebagai lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai mata, telinga dan mulut pemerintah daerah Kota Malang mempunyai tugas dalam memberikan atau memberitahukan informasi informasi yang dibutuhkan masyarakat Kota Malang pada khususnya dengan melalui media massa.

Sebagai sarana komunikasi yang efektif, media massa mempunyai tiga fungsi utama yaitu : informatif, edukatif dan rekreatif. Dimana ketiga fungsi tersebut dimaksudkan agar media massa mampu menjadi sarana Pemerintah Kota Malang yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan masyarakat dan mampu menjadi sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui proses interaksi yang baik. Seperti halnya fungsi informastif, media massa berupaya memberikan berita secara teratur kepada masyarakat tentang berbagai hal seputar Kota Malang dan sekitarnya. Dan fungsi edukatif, berupaya memberikan informasi yang bersifat mendidik dan bersifat pengetahuan.

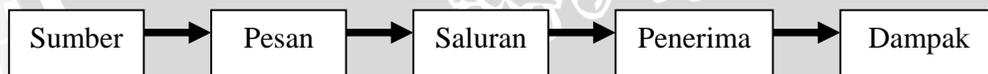
Sementara itu fungsi rekreatif, media massa memberikan berbagai informasi yang bersifat menghibur.

Memalui pelaksanaan secara optimal ketiga fungsi media massa tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi terhadap segala pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya diam dan langsung menerima informasi yang diberikan tetapi mereka juga dapat memberikan tanggapan, saran, kritik ataupun aspirasi mereka kepada pemerintah melalui media massa, sehingga penyampaian informasi dapat berjalan dua arah.

Sebagaimana menurut Koncaid dan Schramn, komunikasi merupakan sebuah proses yang dapat diartikan sebagai proses berbagai informasi secara bersama dan terdapat pertalian antara para peserta. Sehingga dalam proses komunikasi tersebut harus dapat dengan selektif memilih alat komunikasi dan pola apa yang sesuai untuk mendiskripsikan dan menjabarkan suatu pikiran, sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang apada akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Sementara menurut Lasswell, cara terbaik untuk menggambarkan sebuah komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti halnya: who says what in which channel to whom with what effect? siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?. Hal tersebut dapat dijabarkan melalui gambar berikut :

### KOMUNIKASI



sumber : Mulyana, 2004

Dari gambar tersebut diatas dapat ditarik keterangan yaitu :

Sumber : pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa meliputi seorangh individu, kelompok, organisasi, perusahaan aau bahkan suatu negara.

Pesan : apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan dapat berupa simbol verbal ataupun non verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan atau maksud sumber tadi.

Saluran : merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.

Penerima : orang yang menerima pesan dari sumber.

Dampak : efek apa yang terjadi kepada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. (Mulyana, 2004 : 62)

Dalam perkembangan yang ada, media massa juga dikatakan memiliki peran sebagai “anjing penjaga” dan berdiri disisi yang berlawanan dengan pemerintah dan mempunyai peran yang sangat penting terhadap masyarakat luas. Karena media massa merupakan lembaga resmi yang mempunyai landasan hukum untuk berkewajiban menyebarkan informasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat dan pihak pihak yang terkait dalam berita yang disampaikan.

Meskipun demikian partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam perkembangan dan perwujudan fungsi media massa karena perkembangan media massa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. sehingga setiap masyarakat dapat dikatakan berkontribusi dalam proses pembangunan yang ada dan mempengaruhinya.

#### **b. Upaya Humas Terhadap Pengembangan Media Massa**

Kota Malang sebagai salah satu kota besar dalam wilayah jawa timur terus berupaya memperbaiki segala sektor yang ada, begitu juga dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mempermudah penyebaran informasi peran Humas Kota Malang sangat memegang tugas dan fungsi yang penting, karena keberhasilan pemerintah dalam mengkomunikasikan program-program dalam penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi pula oleh upaya Humas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran serta media massa. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai upaya optimal yang tepat agar berhubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui media massa tetap dapat berjalan dengan lebih baik.

Humas Kota Malang sebagai satu lembaga resmi pemerintah daerah Kota Malang yang bergerak dalam bidang penyampaian informasi ini juga terus berupaya meningkatkan dan memanfaatkan media massa yang ada, baik media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari digunakan oleh masyarakat. Upaya – upaya tersebut antara lain meliputi :

### **1. Keterbukaan Informasi**

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, kehadiran media massa juga menuntut dua perkembangan, yakni kemajuan teknologi untuk menghasilkan berbagai peralatan yang dibutuhkan dan adanya keinginan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut maka Humas Kota Malang mewujudkan adanya keterbukaan informasi yang merupakan tindak lanjut dari perkembangan media massa tersebut. Oleh karena itu Humas membuka akses informasi seluas luasnya kepada media massa untuk menyampaikan dan menyebarkan berbagai informasi, baik meliputi tentang proses pemerintahan, kebijakan pemerintah maupun kegiatan kegiatan Pemerintah Kota Malang.

Sehingga media massa tidak akan mengalami banyak hambatan dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat, selama masih sesuai peraturan dan dalam koridor tupoksi pemerintah serta masih dalam kaidah kode etik jurnalistik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kertapati, bahwa media massa harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

7. Publisitas dalam sifatnya, artinya terbuka untuk umum, setiap orang dapat turut serta mengetahuinya
  8. Masalitas dalam produknya, artinya hasilnya dapat berlipat ganda.
  9. Universalitas atau pluralitas dalam penyampaiannya, artinya apa yang ditujukan harus menyangkut segala segi kehidupan masyarakat atau perhatian manusia.
  10. Aktualitas dalam isi pesannya, artinya sesuai dengan perhatian dan kepentingan masyarakat manusia.
  11. Perioditas dalam penyiarannya, artinya teratur waktu-waktu siarannya.
  12. Simultan penerimaannya oleh khalayak.
- (Kertapati 1981:106)

Dengan keterbukaan informasi yang saat ini ditingkatkan oleh Humas Kota Malang sebagai salah satu bentuk upaya untuk memanfaatkan media massa,

diharapkan dapat berjalan dengan baik karena Humas berusaha meletakkan media massa pada posisi yang sejajar yaitu sebagai mitra kerja yang baik, yang akan terjalin kerjasama yang baik diantara keduanya sesuai fungsi dan tugas masing masing.

Sebagaimana ditambahkan dengan pernyataan SubBagian Humas Kota Malang, Bapak M. Nurwidianto S.Sos yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi dimulai dari era Presiden Habibie, dimana era tersebut memberi angin segar kepada pers. diikuti dengan kebebasan media untuk mengakses informasi. Humas sejalan dengan semangat itu juga sangat terbuka, dimana Humas memperbolehkan media massa mengakses informasi selama masih dalam koridor tupoksi pemerintah dan masih dalam kaidah kode etik jurnalistik. Humas meletakkan media massa sebagai mitra kerja yang sejajar dan menurut porsinya sebagai media massa

## 2. Siaran Pers

Siaran Pers yang dijalankan oleh bagian Humas Kota Malang mempunyai kontribusi yang besar baik itu dari pihak pemerintah daerah Kota Malang, media massa dan tentunya masyarakat Kota Malang. pemerintah daerah menginformasikan suatu kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat dengan melalui peran media massa. Wartawan dari media massa dapat mengambil atau mengakses siaran pers dengan mudah di bagian Humas Kota Malang. bagian Humas hampir tiap hari menerbitkan siaran pers yang berisi kebijakan, program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Seperti yang dikemukakan Jefkins (1995:61-62) dalam bukunya public relation terdapat beberapa media yang dapat digunakan oleh Humas dalam proses penyampaian informasi, yaitu :

- i. Media Pers, terdiri dari berbagai macam Koran yang beredar di masyarakat secara umum, baik berskala regional maupun nasional atau bahkan internasional, Koran-koran gratis ; majalah-majalah yang diterbitkan secara umum naupun hanya dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu; buku-buku petunjuk khusus; buku-buku tahunan dal laporan-l;aporan tahunan dari berbagai lembaga yang sengaja dipublikasikan secara umum.

- j. audio visual, media ini terdiri dari slide dan kaset video, atau bias berupa film-film documenter.
- k. Radio, meliputi semua jenis radio; mulai dari yang berskala local, nasional, ataupun internasional baik dipancarkan luas maupun yang dikemas secara khusus.
- l. Televisi, tidak hanya televisi nasional ataupun regional tetapi juga televisi internasional. Termasuk pula system-sistem teletex seperti prestel, oracle dan ceetax, yaitu perangkat yang memungkinkan pemakainya memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkannya melalui siaran televise terbatas.
- m. Bahan-bahan cetakan(printed material) yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, informative dan menghibur yang disebarakan dalam berbagai bentuk guna mencapai tujuan Humas tertentu.
- n. Penerbitan buku khusus (sponsored book)
- o. Surat langsung (spoken word), melalui komunikasi langsung atau tatap muka yang bias dilangsungkan dalam berbagai kesempatan.
- p. Pemberian sponsor (sponsorship) sering dilakukan dalam rangka melancarkan suatu iklan atau mendukung usaha-usaha pemasaran. Dalam setiap sponsor selalu terkandung elemen Humas karena terdapat niat baik organisasi yang memberikannya.

Dari kutipan yang dikemukakan Jefkin diatas maka siaran pers dapat dikategorikan sebagai media pers, dimana informasi yang tertuang dalam siaran pers ini dapat diteruskan oleh media massa dalam fungsinya menyebarkan informasi kepada khalayak luas.

Siaran pers ini juga berfungsi agar media massa tidak kering berita dan tetap mampu menjalankan peran sebagai penyalur informasi dengan sebaik mungkin. Dalam artian media massa akan mampu menyajikan berbagai informasi dan berita, baik yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan maupun hiburan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas yang di pegangnya.

Dengan adanya siaran pers ini, maka jalur informasi antara pemerintah daerah kepada masyarakat akan tetap terhubung dan akan memberikan dampak positif terhadap proses pemerintahan. Dengan lancarnya arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan ataupun sebaliknya dapat tercipta hubungan timbal balik yang baik. Hal ini juga akan membawa dampak pada lancar atau tidaknya penyampaian program-program yang dimiliki oleh pemerintah bagi masyarakat.

### 3. Kegiatan Pengklipingan

Kegiatan pengklipingan yang dilakukan oleh bagian Humas Kota Malang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan menciptakan jalur informasi yang

selaras antara pemerintah kepada masyarakat melalui media massa. Kegiatan ini merupakan kegiatan harian yang dilakukan oleh Humas Kota Malang disamping kegiatan kegiatan lain yang merupakan tugas dan fungsi Humas.

Dalam pengklippingan ini menggunakan media cetak sebagai bahan pengklippingan. Koran ataupun tabloid dijadikan sumber untuk mengumpulkan berita yang dirasa penting dan juga secara tidak langsung terkandung aspirasi masyarakat. Berita-berita tersebut dikumpulkan untuk kemudian dipelajari dan dijadikan bahan pelaporan kepada pemerintah daerah Kota Malang agar dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Adisasmita (2006:132) yang menyebutkan bahwa Partisipasi masyarakat sebagai strategi kebijakan dimaksudkan sebagai upaya atau tindakan dalam perumusan dan implementasi berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat secara *reliable, acceptable, implementable, dan workable*.

Seperti halnya kegiatan pengklippingan yang mengambil sumber dari media massa yang bisa dipercaya informasinya sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan selanjutnya. Dimana kebijakan yang dirumuskan tersebut dapat meyakinkan dan terpercaya (*Reliable*), dapat diterima oleh masyarakat luas (*Acceptable*), dapat diimplementasikan karena program disusun oleh masyarakat berdasarkan potensi (*Implementable*), dan dapat dikerjakan masyarakat setempat (*Workable*).

## **2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peranan Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan Good Governance**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999**

Bagian Humas Kota Malang dalam tugas dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang yang ada dan juga peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam fungsi sebagai penyalur informasi baik itu dari pemerintah daerah atau menuju pemerintah daerah yang merupakan fungsi sebagai media penghubung, Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 menjadi acuan dalam melakukan fungsinya. Sebagaimana yang tertuang didalamnya bahwa kemerdekaan pers

merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat dapat terwujud dengan baik.

Bagian Humas Kota Malang dalam menyikapi keterbukaan pers yang tertuang dalam undang-undang tersebut dengan memberikan informasi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang yang tentunya dengan bantuan media massa sebagai alat penyebaran informasi tersebut. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengadakan siaran pers dan kegiatan pengklipingan merupakan beberapa diantara sekian banyak tugas dan fungsi Humas yang terkait dengan Undang-Undang Pers no 40 Tahun 1999. Dimana kegiatan tersebut merupakan perwujudan nyata tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat dari pemerintah Kota Malang. Dimana melalui kegiatan tersebut dapat berdampak baik terhadap masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri, masyarakat dapat menikmati akses informasi yang bisa dipercaya dan mudah mendapatkannya dan disisi pemerintah dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat, dimana kepercayaan tersebut yang saat ini dibutuhkan untuk tetap membuat kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Berdasar pernyataan-pernyataan dan data yang disajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat di Kota Malang menjadi pendukung terhadap penyebaran informasi di Kota Malang., karena tidak dapat dipungkiri pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat mengakses atau mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Dan hal itulah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan arus informasi di Kota Malang.

Menurut Muluk (2007:19) memperjelas partisipasi masyarakat dengan mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970-an yaitu sebagai penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata.

Dengan kata lain partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada perkembangan suatu bangsa, karena pada dasarnya masyarakat yang baik tidak hanya akan berlaku sebagai objek dari suatu perubahan dan pembangunan tetapi juga dapat menjadi subjek dari perubahan dan pembangunan suatu bangsa. Sehingga setiap individu masyarakat mempunyai hak dan ikut bertanggung jawab pada setiap hal yang terkait dengan kemajuan bangsa, dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada perkembangan dan kemajuan Kota Malang.

Seperti halnya Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan terlihat pada arti partisipasi masyarakat yang merupakan faktor penting bagi Humas. Selama ini bagian Humas Kota Malang juga memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi kepada pemerintah daerah dari masyarakat yang tentunya didapat dari media massa. Dengan media massa menerbitkan atau mencantumkan aspirasi dari masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik, maka hal tersebut dirasa sangat membantu tugas Humas Kota Malang dalam mendapatkan informasi.

Menurut Prasajo (2004:10), Partisipasi masyarakat (rakyat) dalam proses pembuatan keputusan dan pemerintahan secara umum, sebagai salah satu prinsip demokrasi, berkembang menjadi tuntutan yang semakin luas diterima di berbagai belahan dunia. Tuntutan akan partisipasi ini berangkat dari pemahaman bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan sesungguhnya dalam sebuah negara.

Dengan masyarakat aktif memberikan partisipasinya kepada pemerintah Kota Malang, baik itu melalui fungsi media massa ataupun secara langsung ke pada pemerintah, maka hal itu merupakan faktor yang sangat menunjang pemerintah kota untuk dapat membuat keputusan atau kebijakan secara tepat dan menyangkut seluruh aspek masyarakat. Dimana masyarakat (rakyat) memegang kedaulatan dan kekuasaan.

## **b. Faktor Penghambat.**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di bagian Humas Kota Malang dirasa peneliti masih kurang maksimal, mengingat padatnya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh bagian Humas Kota Malang ini. Hal ini lebih dikarenakan ruangan yang digunakan bagian Humas Kota Malang dinilai masih kurang cukup atau kurang besar, mengingat jumlah karyawan dan non karyawan yang banyak dan sering beraktivitas dan melaksanakan tugas sehari-harinya di dalam ruangan.

Sementara itu, komputer merupakan sarana yang dinilai penting dalam kegiatan bagian Humas Kota Malang terkait dalam pengolahan dan penyajian data-data yang ada, juga terlihat masih kurang memadai. Pada bagian Humas Kota Malang, komputer yang disediakan di ruang komputer hanya 3 buah dan dipakai secara bergantian. Padahal sebaiknya komputer harus terdapat di setiap meja para karyawan, agar kinerja karyawan dapat maksimal. Dengan penyediaan komputer sebagai alat kerja bagi karyawan yang hanya 3 buah tersebut maka dapat mengakibatkan banyak karyawan yang menganggur karena menunggu komputer yang digunakan karyawan lain. Hal ini dirasa sangat menghambat kinerja bagian Humas Kota Malang.

Tata ruang yang terdapat di bagian Humas Kota Malang juga masih dirasa kurang memadai, karena banyak peralatan, perkakas dan kertas-kertas yang masih kurang tertata dengan rapi, dan juga penempatan meja karyawan dengan meja karyawan lainnya saling berdempetan serta terkesan berdesak-desakan. Namun penempatan ruang bagian Humas Kota Malang yang berada di paling depan sebelah kanan kantor pemerintahan Kota Malang memberikan perhatian yang lebih bagi masyarakat yang datang pada kantor pemerintah Daerah Kota Malang. Mengingat tugas dan fungsi bagian Humas yang syarat dengan aktivitas hubungan dengan masyarakat secara langsung, maka penempatan ruangan paling depan dapat menunjang aktivitas bagian Humas Kota Malang.

## 2. Sumber Daya Manusia

Mengacu pada data yang disajikan diatas, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan apakah peran Humas dapat dijalankan dengan baik. Kondisi sumber daya manusia yang ada di bagian Humas Kota Malang secara tidak langsung salah satunya dapat diketahui melalui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai. Sebagaimana diketahui bahwa Bagian Humas Kota Malang, dimana dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan oleh 22 orang staff/ karyawan, masing-masing karyawan tersebut telah memiliki tugas yang berbeda beda sesuai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing petugas. Dengan rincian 1 (satu) orang berpendidikan akhir S3, 7 (tujuh) orang yang telah berpendidikan S1, dan 14 (empat belas) orang berpendidikan akhir SLTA.

Dengan melihat banyaknya karyawan yang berpendidikan SLTA maka hal tersebut dapat mempengaruhi lambatnya proses kinerja sebagai wujud kurang maksimalnya proses yang dijalankan masing-masing komponen yang ada sesuai porsi kerja masing-masing dan yang juga berpengaruh pada hasil yang dicapai oleh bagian Humas Kota Malang ini pada akhirnya.

Hal ini ditambah dengan pernyataan Kepala SubBagian Humas Bapak M. Nurwidyanto S.Sos yang menyatakan bahwa Kendala yang dihadapi Humas Kota Malang salah satunya yaitu sumber daya manusia yang masih kurang memadai, karena Humas sebagai kantor pemberitaan daerah harusnya memiliki Sumber daya manusia yang memiliki ilmu tentang jurnalistik, yang nantinya akan dipakai dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Kota Malang.

Dengan masih banyaknya karyawan yang kurang memiliki ilmu jurnalistik, maka hal tersebut dimungkinkan dapat menghambat kinerja bagian Humas Kota Malang. Karyawan dituntut untuk memiliki ilmu-ilmu jurnalistik, hal ini sesuai dengan tuntutan profesi dimana mereka sangat diharapkan untuk dapat melakukan kegiatan pemberitaan dengan baik agar berita yang disampaikan kepada masyarakat juga dapat diterima dengan baik.dengan demikian akan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui kinerja Humas.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

#### 1. Peran Humas Dalam Memanfaatkan Media Massa Guna Mewujudkan *Good Governance*

Keterbukaan informasi dilakukan oleh Humas Kota Malang dengan memberikan akses selebar-lebarnya kepada media massa atau masyarakat secara langsung mendapatkan informasi, partisipasi masyarakat dilakukan dengan menampung aspirasi dengan melakukan kegiatan pengklipingan dan aspirasi tersebut akan digunakan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya, transparansi yaitu dengan melakukan siaran pers dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tunduk pada suplemasi hukum merupakan beberapa prinsip *good governance* yang sedang dilakukan oleh bagian Humas Kota Malang. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan Humas Kota Malang dalam memanfaatkan media massa. Dengan menjalankan beberapa prinsip *good governance*, pemerintah Kota Malang berupaya untuk menuju pemerintah yang baik atau *good governance*.

##### a. Fungsi Media Massa Bagi Humas Kota Malang

Media massa mempunyai tiga fungsi utama sebagai sarana komunikasi yang efektif, yaitu : informatif, edukatif dan rekreatif. Dimana ketiga fungsi tersebut dimaksudkan agar media massa mampu menjadi sarana Bagian Humas Pemerintah Kota Malang yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan masyarakat dan mampu menjadi sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui proses interaksi yang baik. Dan dukungan yang diberikan media massa juga melalui turut menjaga arus informasi agar informasi tidak hanya mementingkan salah satu pihak saja.

##### b. Upaya Humas Terhadap Pemanfaatan Media Massa

Demi terwujudnya arus informasi yang lancar Humas Kota Malang melakukan upaya-upaya yaitu diantaranya dengan melakukan keterbukaan informasi, dimana Humas secara terbuka menginformasi semua kegiatan-kegiatan, program atau kebijakan yang tentunya masih ada batas-batas penyampaian kepada khalayak luas. Tidak hanya itu, Humas Kota Malang juga membuat suatu kegiatan yaitu siaran pers dan pengklipingan. Dimana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyebarkan informasi dan menampung aspirasi dari masyarakat yang tentunya melewati bantuan media massa.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peranan Humas Dalam Mengembangkan Media Massa Guna Mewujudkan *Good Governance***

### **a. Faktor Pendukung.**

Faktor pendukung terdiri dari Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 memberi acuan bagi Humas Kota Malang dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dan partisipasi masyarakat terhadap penyebaran informasi di Kota Malang dapat dikatakan baik, masyarakat dapat menerima dan memberikan tanggapan ataupun aspirasi kepada pemerintah Kota Malang baik itu secara langsung ataupun melalui media massa.

### **b. Faktor Penghambat.**

Faktor-faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dihadapi Humas Kota Malang mungkin juga dialami instansi-instansi lain karena kebanyakan mengalami kendala yang sama. Sumber Daya Manusia yang ada di Humas Kota Malang dirasa masih kurang mengingat kurangnya pengetahuan jurnalistik yang dimiliki masing-masing karyawan. juga sarana prasarana yang masih perlu ditambah ataupun di tingkatkan menginggat padatnya kinerja di bagian Humas Kota Malang.

## **B. SARAN**

1. Bagi Bagian Humas Kota Malang sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki beberapa kekurangannya terkait peran dan fungsinya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti halnya pengadaan pelatihan-pelatihan seperti ilmu-ilmu jurnalistik

yang merupakan dasar agar karyawan dapat bekerja dengan baik dalam menyebarkan arus informasi kepada masyarakat luas. juga penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana dirasa perlu mengingat perkembangan jaman yang terus berkembang.

2. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang serius terhadap masukan masukan yang diberikan masyarakat melalui peran Humas, dan membuat suatu kebijakan atau program-program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Sehingga diharapkan ada hubungan saling percaya antara pemerintah daerah Kota Malang dengan masyarakatnya.
3. Masyarakat sebaiknya juga meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan komunikasi yang baik dalam pemerintahan menuju *Good Governance* dengan selalu menggunakan media massa sesuai dengan fungsinya dan mengikuti setiap perkembangan berita yang ada dengan memahami, menelaah serta mau dan mampu memberikan tanggapan atas informasi berita yang telah disampaikan. Sehingga akan terjalin hubungan timbal balik yang menjadikan komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih jelas dan transparan.
4. Hendaknya dilakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dalam hal ini Humas dengan media massa demi terwujudnya kelancaran arus informasi kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Penerbit Bayumedia Publishing.
- Basuki Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang : Penerbit SPOD FE Unibraw.
- Blake Reed H dan Haroldsen Edwin O. 2003. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya : Penerbit : Papyrus.
- Bodgan, Robert C. Dan Sari Knopp Biklen, 1990. *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar Ke Teori dan Metode*. Jakarta: PAU-UT (Alih Bahasa Munandir)
- Cangara, Hafield. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajawali
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah : Otonomi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Effendy, Onong U. 1981. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung : Penerbit : Alumni
- Faisal, S. 1982. *Format – Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, Jakarta.
- Ismani, HP. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang : IKIP
- Jefkins, Frank. 1995. *Public Relation*. Jakarta : Erlangga
- Kansil, C.S.T. 1983. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru
- Kertapati, Ton. 1981. *Bunga Rampai Azas-Azas Penerangan dan Komunikasi*. Jakarta : Bina Aksara
- Marshall, Catherine dan Rossman, Gretchen B. 1989. *Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi*. London: LP3ES.
- McQuail, Dennis. 1994. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Milles, M.E3. dan Huberman A.M. 1992. *Analisis Dalam Kualitatif*; terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Cetakan Ke-13, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mondry, M. 2006. *Komunikasi Media Massa Dalam Pembangunan*. Malang : Penerbit Yayasan Pembangunan Nasional Malang.

Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Malang : Banyumedia Publishing

Mulyana Deddy. 2004. *Ilmu Knomunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Penerbit : PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Muh. 2003. *metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu.1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pamudji, S.1986. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara

Saparin, Sumber.1988. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Schramm, Wilbur.1987. *Azas-Azas Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta : LP3ES

Soejito, Irawan. 1981. *Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.

Yuwono, Trisno. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Arkola.

#### **Jurnal :**

Islamy, Irfan. 2004. Membangun Masyarakat Partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik Vol.IV*, h. 3-7. Malang: FIA Brawijaya

Prasojo, Eko. 2004. People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik Vol.IV*, h. 65-78. Malang: FIA Brawijaya

#### **Peraturan :**

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jakarta: Pusat Info Data Indonesia (PIDI)

PP 15/1987, Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

**Internet :**

Telecenter Daaragati.2008.tantangan berat bagi aparat humas saat ini (online) ([www.jatimprov.go.id/telecenter/malang](http://www.jatimprov.go.id/telecenter/malang)) diakses tanggal 24 Oktober 2008

Abdullah, Abu.2005. [Peran Media Komunikasi Modern \(TV\) sebagai Sarana untuk Menghancurkan](http://www.al-ikhwan.net/peran-media-komunikasi-modern-tv-sebagai-sarana-untuk-menghancurkan-29/) (online) (<http://www.al-ikhwan.net/peran-media-komunikasi-modern-tv-sebagai-sarana-untuk-menghancurkan-29/>) diakses tanggal 24 Oktober 2008.

Puspita Fatma.2007. Media Massa, Pemerintah dan Humas (online) (<http://duniaesai.com/komunikasi/index.html>) diakses tanggal 12 november 2008.

\_\_\_\_\_.2007. Bagian Humas Pemerintah Kota Malang (online) (<http://humas.malangkota.go.id/profile.php>) diakses tanggal 11 Agustus 2008.

\_\_\_\_\_. 2007. Pemerintah kota Malang (online) (<http://www.malangkota.go.id/>) diakses tanggal 11 Agustus 2008.

\_\_\_\_\_.2006. Komunikasi Massa (online) (<http://www.inherent.brawijaya.ac.id>) diakses tanggal 5 Agustus 2008.

\_\_\_\_\_.2007. Komunikasi (online) (<http://massofa.wordpress.com/?s=komunikasi>) diakses tanggal 6 Agustus 2008